

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana

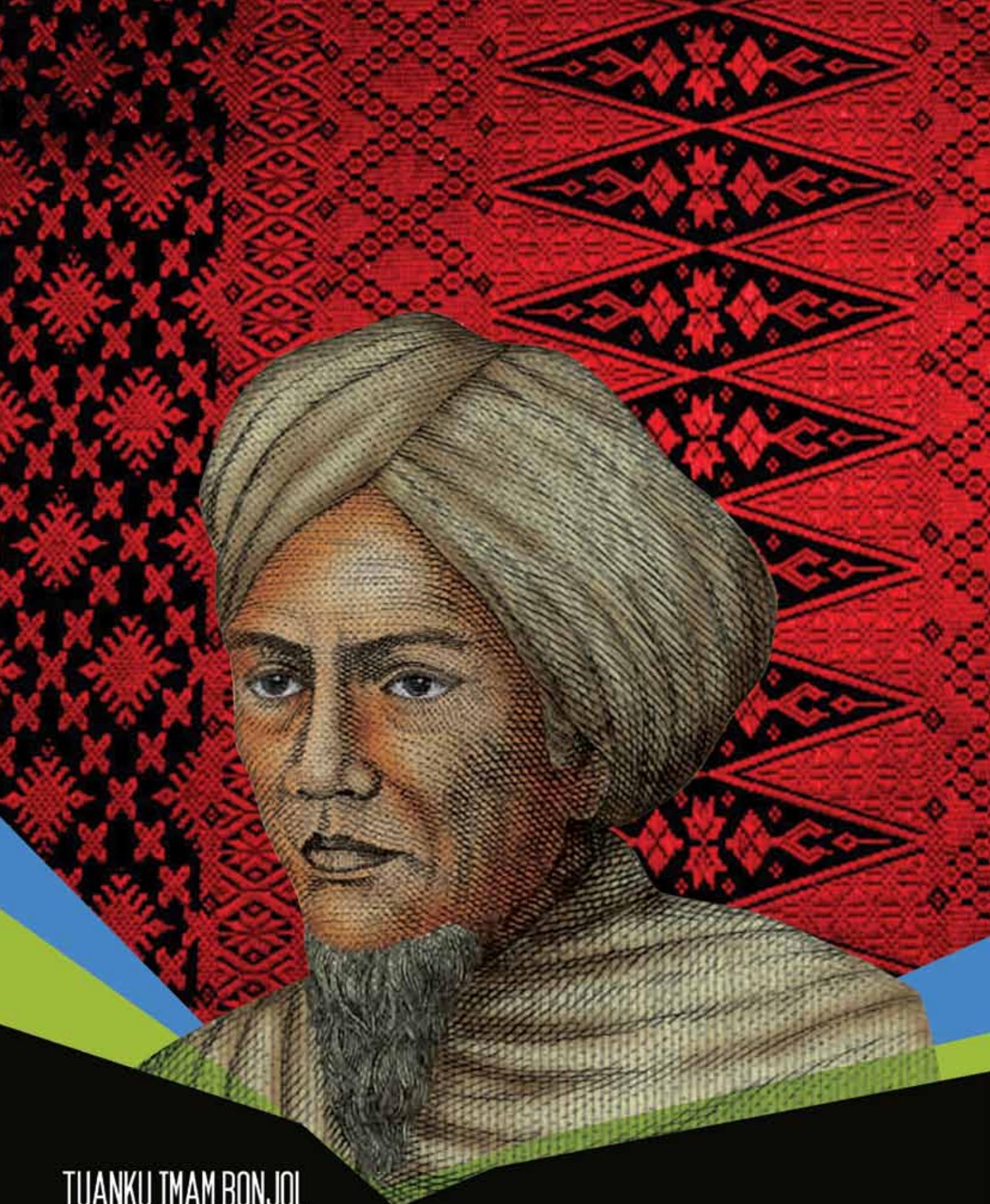
Volume 20 | Tahun 10 | Agustus 2013



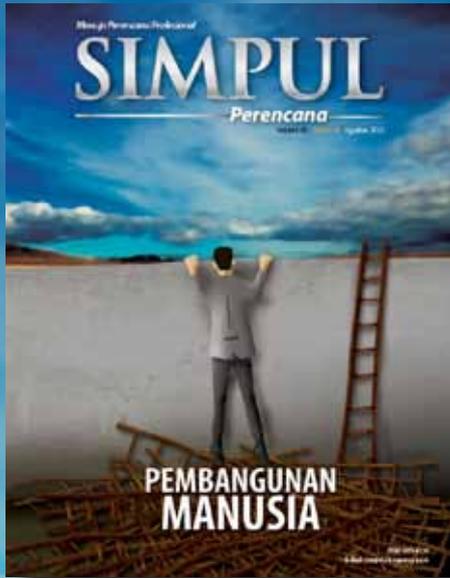
**PEMBANGUNAN
MANUSIA**

ISSN 1693-4229

E-Mail : simpul@bappenas.go.id



TUANKU IMAM BONJOL



SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN BAPPENAS).

PELINDUNG: Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

TIM PELAKSANA

PEMIMPIN UMUM: Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN BAPPENAS)

PEMIMPIN REDAKSI: Wiwit Kuswidiati

DEWAN REDAKSI: Shri Mulyanto, Zamilah Chairani, Meily Djohar, Hari Nasiri Mochtar, Guspika, Edy Purwanto

REDAKTUR PELAKSANA: Wily Witarni, Maslakah Murni, Rita Miranda, Edy Susanto, Dwi Harini Septaning Tyas, Feita Puspita Murti

DISTRIBUSI/SIRKULASI: Eko Slamet Suratman

ADMINISTRASI/KEUANGAN: Nita Agustin

EDITOR : Setio Utomo dan Tim Simpul

GRAFIS & LAYOUT : Hendra Yudiyanto

TENAGA PENDUKUNG: CH. Nunik Ispriyanti, Sukranto, Jajang Muhari, Abdul Rachman

ALAMAT REDAKSI :

Pusbindiklatren Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310 , Gedung 2A lantai II

Telp .(021) 319 31447, 319 34147

E-Mail: simpul@bappenas.go.id

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan bisa dikirim kapan saja.

Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepentasnya.

Pembaca Simpul yang budiman,

Waktu terus berlalu begitu cepat mengiringi semua kegiatan kita. Kami diredaksi Simpul juga terus berusaha meningkatkan kualitas majalah Simpul, khususnya dalam materi yang berisi informasi yang sangat dibutuhkan dan berguna bagi pembaca sekalian. Dalam Simpul volume 20 kali ini, banyak yang ingin kami sampaikan kepada para pembaca. Keterbatasan halaman, edisi terbit dan keterbatasan waktu membuat kami harus memilih mana informasi, bahan dan sajian yang paling baik dan tepat untuk para pembaca. Menyambut beberapa hal yang akan kita hadapi tahun depan (2014), dimana disebutkan tahun 2014 merupakan tahun politik karena akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta akan berlakunya ASEAN *Open Community* dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional III (RPJMN III), kami memilih tema utama tentang persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dengan segala aspek yang melingkupinya. Hal ini penting karena kualitas SDM bangsa kita akan menjadi modal dasar dalam pembangunan ke depan dan sebagai pusat dari seluruh rencana pembangunan yang dilaksanakan. Kami mencoba memotret bidang yang sangat berpengaruh dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM kita, khususnya yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan budaya. Kami berharap tema ini menjadi refleksi tentang pembangunan SDM kita selama ini dan menyiapkan kebijakan, program dan strategi yang lebih baik ke depan. Kami melakukan diskusi dan wawancara kepada para ahli yang kompeten dan memahami tentang peningkatan SDM sesuai bidangnya. Ada Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Banten, yang mengemukakan gagasannya tentang pembangunan SDM dari aspek agama, Prof. Dr. Iwan Pranoto, guru besar Matematika ITB dan Ketua Prodi IKM Universitas Padjajaran, Bandung yang memberikan wawasannya tentang pentingnya memberikan perhatian yang “memadai” dari aspek bidang kesehatan dalam pembangunan SDM Kita. Tema kondisi dan kualitas SDM kita menjadi sangat mendesak dan pengingat kita bersama karena akan berlakunya ASEAN *Open Community*, dimana dalam dunia kerja kita akan bersaing dan berkompetisi dengan masyarakat dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Juga menghadapi apa yang disebut Bonus Demografi tahun 2020-2030 maka bangsa Indonesia harus mempersiapkan kualitas SDM-nya bila ingin mendapatkan keuntungan dari adanya Bonus Demografi tersebut.

Akhirnya kami berharap informasi dan isi Majalah Simpul Perencana volume 20 ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi positif bagi siapa saja yang membaca, khususnya aparat instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Tetap semangat....!

Redaksi

Cakrawala:



Dra. Nina Sardjunani, MA
Deputi Meneg PPN Bidang SDM dan Kebudayaan

Ada 3 aspek yang dijadikan indikator dalam pengukuran IPM, yaitu tingkat pendidikan (angka melek huruf atau angka rata-rata sekolah), tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat ekonominya. Bagaimana dengan peran dan fungsi budaya dalam pembangunan manusia di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang begitu banyak secara etnis, apa pengaruhnya dan keterkaitannya dalam IPM ?, **Baca hal...8**



Prof. Iwan Pranoto
Guru Besar ITB

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia disebuah bangsa, termasuk Indonesia. Dengan alokasi dana pembangunan yang bersumber dari APBN sebesar 20% untuk alokasi bidang pendidikan (sesuai amanah undang-undang dasar). Bagaimana kondisi kebijakan pendidikan dalam kaitannya dengan pembangunan SDM di Indonesia? **Baca hal...14**



DR. Dr. Deni Kurniadi Sanjaya, DESS
Kepala Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran

IPM Indonesia masih jauh tertinggal di antara-antara negara-negara di dunia, bahkan untuk level di negara Asia Tenggara IPM Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Bagaimanakah sebenarnya Pembangunan Kesehatan di Indonesia saat ini dan ke depan? **Baca hal...24**

Wawancara



Prof. Komaruddin Hidayat
Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Banyak faktor dan bidang yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Bagaimana pendidikan dan pendidikan agama memberi kontribusi dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, **Baca hal...40**

Lainnya:

hal.

- 3 DARI KAMI
- 5 GERBANG
- 33 FORUM AP2I
- 37 INFO BEASISWA
- 47 LIPUTAN
- 55 SOSOK ALUMNI
- 60 AKADEMIKA
- 63 OPINI
- 66 SELINGAN



PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber Daya Manusia Indonesia, Bagaimana meningkatkan kualitasnya ?

Isu tentang SDM selalu menjadi isu besar dan menarik untuk dibahas karena dalam era pembangunan bangsa kita saat ini dan mungkin masih dalam 30 tahun ke depan masih harus mendapat perhatian serius. Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan menjadi tema pembangunan di seluruh dunia (*people center development*). Mengapa pembangunan SDM menjadi hal yang sangat penting dan serius bagi bangsa Indonesia?



Banyak alasan dan sebab yang bisa menjelaskan isu pembangunan manusia ini. Menghadapi globalisasi dan pasar bebas di mana bangsa Indonesia sudah ikut bergabung dan meratifikasinya maka mau tidak mau, suka tidak suka kita akan berhadapan dengan kompetisi secara “terbuka” dalam berbagai hal bidang kehidupan, termasuk berkompetisi dalam kesempatan kerja, menduduki posisi tertentu dalam sebuah organisasi, perusahaan, organisasi sosial internasional dan kompetisi sesama manusia secara individu lainnya. Dalam kondisi dan posisi inilah maka isu kualitas SDM Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak untuk terus ditingkatkan. Dari data yang ada Indeks Pembangunan Manusia/ *Human Development Index* (IPM/HDI) Indonesia pada tahun 2012 menduduki peringkat 121 dari seluruh negara di dunia (UNDP, 2013). Meskipun mengalami kenaikan dari angka 0,624 pada tahun 2011 menjadi 0,629, namun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN kita masih berada di bawah, Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan kondisi demikian maka untuk bersaing

dalam masyarakat terbuka ASEAN yang akan berlaku tahun 2015 bangsa Indonesia harus melakukan banyak hal secara cepat untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM nya untuk kebutuhan jangka pendek. Sedangkan pembangunan dan peningkatan SDM jangka panjang perlu dilakukan secara terencana, terukur dan cara-cara terbaik guna menyongsong berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 dimana pada periode akhir RPJPN ini diperkirakan bangsa Indonesia akan memiliki bonus demografi. Secara sederhana Bonus Demografi merupakan kondisi atau keadaan dimana suatu negara memiliki komposisi penduduk yang sangat besar pada usia produktif (15-64 th) di banding penduduk tidak produktif. Dengan komposisi penduduk demikian maka tingkat ketergantungan

(*dependency ratio*) sangat rendah. Apabila bonus demografi ini bisa diserap ke lapangan kerja maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka ada prasyarat tersedianya lapangan kerja dan bonus demografi tersebut memiliki kualitas yang sesuai untuk masuk ke dalam dunia kerja.

Itulah sebabnya pembangunan SDM menjadi sangat penting dan *urgent*. Dalam mengukur indeks pembangunan manusia ada 3 hal penting yang menjadi indikator sebagai alat ukurnya, yaitu bidang pendidikan (rata-rata lama sekolah), kesehatan (usia harapan hidup) dan standar hidup atau kondisi kemampuan ekonomi/daya beli seseorang. Mengingat IPM dapat menjadi ukuran dan indikator kualitas pembangunan SDM maka sangat penting untuk memperhatikan bidang dan aspek yang mempengaruhinya.

Dua bidang utama yang menjadi faktor dominan dalam pembangunan sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan harus mendapatkan perhatian lebih serius dan dilakukan dengan konsep dan kebijakan yang baik dan benar.

Dengan perbedaan kondisi geografis, perbedaan ketersediaan sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan antara satu pulau dengan pulau lainnya, antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya serta kesenjangan kemampuan antar individu tentu menjadi kendala

tersendiri dalam pembangunan dan peningkatan SDM kita. Dengan memahami situasi dan kondisi tersebut maka pemerintah harus bekerja keras dan melibatkan semua unsur dalam masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan SDM kita dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Dua bidang utama yang menjadi faktor dominan dalam pembangunan sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan harus mendapatkan perhatian lebih serius dan dilakukan dengan konsep dan kebijakan yang baik dan benar. Bidang pendidikan sudah mendapatkan alokasi anggaran sesuai amanah undang-undang yaitu sebesar 20% dari APBN dan tinggal pengelolaannya yang mesti lebih baik, benar dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan situasi. Hal ini penting untuk mempercepat proses dan kemampuan SDM kita, sebagai contoh, di era teknologi saat ini maka pembangunan manusia melalui dunia pendidikan juga harus mengedepankan penguasaan dan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Aspek pemerataan juga harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan bidang pendidikan termasuk mempertimbangkan aspek kebutuhan lokalitas. Sedangkan dalam bidang kesehatan dimana alokasi anggarannya hanya mencapai sekitar 2,3% dari amanah undang-undang sebesar 5 % tentu mengalami hambatan tersendiri. Akan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang juga menjamin aspek kesehatan menjadi motivasi dan semangat baru bagi masyarakat Indonesia untuk lebih maju. Pembangunan manusia tidaklah sama dengan pembangunan dalam bidang fisik yang membutuhkan waktu lebih pendek, material yang kasat mata dan lebih dapat diprediksi, pembangunan manusia membutuhkan waktu lebih lama, membutuhkan sarana fisik dan nonfisik serta harus konsisten dan terencana sejak manusia itu dilahirkan hingga menjadi manusia dewasa. Pembangunan manusia tidak hanya membentuk fisiknya agar menjadi sehat secara jasmani, namun juga mental, karakter, intelektual, ketrampilan, dan psikologisnya.

Dengan demikian pembangunan kualitas manusia Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak untuk ikut berpartisipasi dengan garda terdepan adalah pemerintah sebagai pembuat perencanaan dan kebijakannya. Semoga waktu yang semakin dekat dengan pasar terbuka ASEAN, masyarakat terbuka ASEAN, berakhirnya RPJPN 2005-2030 menjadikan kita semua sadar bahwa persoalan SDM kita masih banyak dan itu juga yang menjadikan kondisi negara kita seperti saat ini dimana kemiskinan masih tinggi, pengangguran banyak dan kesenjangan makin lebar. Semoga.

(SIMPUL)



Pembangunan Manusia Dari Aspek Budaya

Dra. Nina Sardjunani, MA
Deputi Meneg PPN Bidang SDM
dan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara umum masih dilevel bawah dan masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat IPM negara tetangga di kawasan ASEAN. IPM yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara.

Ada 3 aspek yang dijadikan indikator dalam pengukuran IPM, yaitu tingkat pendidikan (angka melek huruf atau angka rata-rata sekolah), tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat ekonominya. Bagaimana dengan peran dan fungsi budaya dalam pembangunan manusia di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang begitu banyak secara etnis, apa pengaruhnya dan keterkaitannya dalam IPM ?, Berikut pandangan Deputy Meneg PPN Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Dra. Nina Sardjunani, MA kepada Simpul.

Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan nasional bagaimana Bappenas melihat kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara umum pada masa lalu, sekarang dan masa depan ?

Kebijakan perencanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara umum pada masa lalu, sekarang dan masa depan dapat dilihat pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN) dan jangka panjang (RPJPN).

Pada periode lima tahun yang lalu, dalam RPJMN 2004-2009, dinyatakan bahwa pembangunan kualitas SDM merupakan bagian dari agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh, yang tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama.

Pada periode lima tahun sekarang, pada RPJMN 2010-2014, diamanatkan bahwa pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Sementara itu pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan, menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen. Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan sampai usia lanjut.



Dra. Nina Sardjunani, MA
bersama Menteri
Sosial dan Menteri
Pemberdayaan
Perempuan

Ke depan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, pembangunan SDM diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

Sebagai bangsa yang beraneka ragam budaya yang tersebar di seluruh Indonesia, apa peran budaya dalam pembangunan Indonesia?

Kita memandang Peran budaya dalam pembangunan sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan kekayaan budaya bangsa yang berasal dan berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air, menjadi salah satu modal strategis untuk membangun manusia Indonesia yang lebih maju, mandiri serta inovatif dan kreatif.

Untuk itu, ke depan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama pemerintah pusat dan daerah, perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan dalam perumusan rencana kebijakan di berbagai bidang pembangunan.



Dok. Sarono Santoso

Di samping itu, keberhasilan pembangunan kebudayaan juga memerlukan peningkatan peranan masyarakat.

Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia baik secara positif maupun negatif terhadap pembangunan SDM Indonesia?

Harus diakui bahwa dunia saat ini memasuki sebuah era global yang sangat kompleks yang ditandai oleh perjalanan tanpa batas, liputan media massa, internet, dan siaran berbagai berita yang mendunia sepanjang hari, sehingga mempengaruhi kebudayaan lokal dan nasional sebuah bangsa. Kompleksitas globalisasi memberikan peluang dan tantangan, dan juga menumbuhkan kesadaran terhadap nasib kebudayaan lokal. Adanya arus

globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya di satu sisi memberi pengaruh positif terhadap perubahan orientasi tata nilai dan perilaku sedangkan di sisi lain menimbulkan pengaruh negatif, seperti mudahnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air.

Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang tumbuh dan berkembang seperti kearifan lokal, solidaritas sosial, kekeluargaan, dan gotong royong telah memberikan pengaruh dan andil positif terhadap pembangunan bangsa. Untuk itu, kebijakan dan program pembangunan SDM diharapkan mampu memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Kearifan lokal, solidaritas sosial, kekeluargaan, dan gotong royong telah memberikan pengaruh dan andil positif terhadap pembangunan bangsa yang harus dilindungi negara”

Apa hambatan dan kendala-kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan SDM dari aspek budaya? Bagaimana mengatasinya?

Memang ada beberapa hambatan dan kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan SDM dari aspek budaya. Hambatan itu antara lain adalah: (1) kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai luhur seperti, cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahan yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terwujud; (2) apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama karya cipta seni dan budaya baik yang bersifat individual maupun kolektif belum sepenuhnya terwujud dengan baik; (3) kualitas upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi hambatan ini maka langkah kebijakan yang ditempuh adalah (1) meningkatkan penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, (2) peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, (3)

Cakrawala

peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, serta (4) pengembangan sumber daya kebudayaan.

Dari sisi indeks pembangunan manusia, berapa besar porsi aspek budaya memberikan sumbangsih kepada pembangunan SDM Indonesia?

IPM atau HDI mengukur pencapaian pembangunan manusia pada suatu negara dalam 3 dimensi dasar yang tercemin dalam taraf pendidikan, kesehatan, serta kemampuan daya beli. Angka HDI merupakan indeks komposit dari tiga komponen (pendidikan, kesehatan, daya beli) yang berkisar 0 s/d 1. HDI menekankan bahwa kemampuan SDM merupakan faktor utama untuk menilai pembangunan suatu negara.

Apakah ada *roadmap* atau strategi nasional dalam pembangunan SDM Indonesia melalui aspek budaya? Apakah perlu disusun Undang Undang tentang budaya sebagaimana UU tentang Sisdiknas, UU Kesehatan yang menjadi panduan dalam pembangunan SDM Indonesia dari masing-masing aspek?

Sebagaimana dituangkan dalam Strategi Nasional Pembangunan SDM (aspek budaya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN 2005 – 2025) dapat kita lihat rangkaiannya sebagai berikut dalam RPJMN-I (2005-2009) kita berusaha Mengembangkan nilai baru yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupan, memantapkan budaya nasional, termasuk wawasan dan budaya bahari dan meningkatkan pelestarian serta pengembangan



kekayaan budaya untuk memperkokoh kedaulatan NKRI berlandaskan Pancasila. Setelah itu dilanjutkan dalam RPJMN-II (2010-2014) dimana Pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Dan dalam RPJMN-III (2015-2019) kita akan melakukan Pemantapan budaya dan karakter bangsa. Kemudian pada RPJMN-IV (2020-2024) kita harapkan dapat Mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia



Dok. Saronno Santoso

Dra. Nina Sardjunani, MA
Dalam Child Poverty
and Social Protection
Conference

yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila

Dengan demikian maka Undang-Undang tentang Kebudayaan perlu disusun untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan yang mencakup antara lain unsur-unsur bahasa, sejarah, sistem sosial, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, spiritualitas, religi dan sistem kepercayaan.

Bagaimana keterkaitan bidang budaya dengan aspek lainnya (pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi) dalam pembangunan SDM Indonesia?

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan di segala bidang. Pembangunan bidang lainnya seperti bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, bidang hankam, iptek, sarana dan prasarana, ekonomi, politik, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, serta bidang SDA dan lingkungan hidup harus mampu melindungi, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sekaligus dapat memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia di tengah tengah pergaulan dunia. Dengan memperhatikan perkembangan dunia pada abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh pertumbuhan global yang berfluktuasi, konflik dan formasi geopolitik baru, maka menuntut agar kebudayaan dalam segala manifestasinya dapat dijadikan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Mengingat begitu pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya di dunia, berinisiatif untuk mendiskusikan, memperdebatkan dan saling mengerti tentang peran kebudayaan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, di penghujung tahun 2013, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara **The World Culture in Development Forum (WCF)**. Dalam forum ini akan dibahas isu-isu penting terkait dengan kebudayaan dan pembangunan.

(SIMPUL)

Prof. Iwan Pranoto
Guru Besar ITB

**Kemajuan Ekonomi Suatu Negara
Digerakkan Oleh Masyarakat
Yang Belajar**

Ketersediaan dana bidang pendidikan memiliki ruang yang lebih luas dalam membuat kebijakan pembangunan bidang pendidikan sebagai roh pembangunan SDM

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia disebuah bangsa, termasuk Indonesia, dengan alokasi dana pembangunan yang bersumber dari APBN sebesar 20% untuk alokasi bidang pendidikan (sesuai amanah undang-undang dasar). Bagaimana kondisi kebijakan pendidikan dalam kaitanya dengan pembangunan SDM di Indonesia, berikut pandangan Prof. Iwan Pranoto, Guru Besar Bidang Matematika ITB kepada Simpul.

Bagaimana relasi pembangunan dan dunia pendidikan ?

Pembangunan suatu bangsa, dimana salah satunya adalah pembangunan ekonomi juga digerakkan oleh masyarakat yang belajar (*learning society*). Dari sini bisa disimpulkan yang membangun *learning society* adalah pendidikan. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara pendidikan dengan persekolahan. Pendidikan tidak selalu diperoleh dari bangku sekolah formal namun bisa didapat di jalur non formal. Menurut saya saat ini pendidikan formal sudah sangat “minim”. Sekarang masalahnya adalah bagaimana persekolahan itu bisa membuat siswanya sanggup belajar terus menerus untuk menciptakan masyarakat belajar.

Menurut pandangan Anda, bagaimana kebijakan tentang persekolahan di Indonesia untuk menghadapi perkembangan 15-20 tahun ke depan termasuk perubahan kurikulum baru, sebagai koreksi kurikulum lama yang dianggap terlalu banyak materi pada aspek kognisinya?

Tepatnya begini, kognisi itu termasuk di dalamnya bernalar. Tetapi kognisi itu yang diabaikan. Saya berbeda dengan orang-orang yang mengatakan lebih menekankan kognisi namun melupakan karakter, menurut saya ini pandangan yang salah, justru nilai kognitif anak-anak kita sekarang jelek, itu faktanya. Jadi banyak pejabat-pejabat kita yang salah persepsi soal apa itu kognisi. Banyak yang mengartikan kognisi adalah hafalan. Padahal makna kognisi yang sebenarnya adalah mencakup semua kemampuan dalam berpikir, justru dalam hal ini kita lemah. Yang kedua, Karakter selalu dikotomikan dengan kognisi itu, ini juga hal yang salah. Kenyataannya, sekolah-sekolah yang baik dalam karakternya itu juga mengembang iklim bernalar yang baik. Maka tidak mungkin seseorang yang karakternya baik kalau dia tidak mampu bernalar. Contohnya, bila seseorang yang tidak berpikir tentang sebuah konsekuensi dari perilakunya maka dia akan berkelakuan buruk. Untuk bisa berpikir tentang konsekuensi logis tersebut maka dia harus bisa bernalar. Bernalar adalah kuncinya, maka jangan dikotomikan antara bernalar dengan karakter. Kalau analisisnya dipisah memang benar, namun saat berhadapan dengan siswa hal ini tidak bisa dipisahkan.



Dok. @draCill

STANDARISASI

jika kita bicara pendidikan maka harusnya mutu layanan pendidikan yang harus di standarisasi

Jika melihat hal tersebut, maka kebijakan saat ini apa yang perlu dikoreksi?

Saya kurang mengerti, menurut teman-teman yang tergabung dalam *Trends in International Math and Science (TIMS)*, untuk kondisi saat ini baru bisa dilihat efeknya 5 tahun lagi jika ikut melihat hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *TIMS*, bahkan untuk bisa sama/stagnant dengan sebelumnya saja sudah bagus. Awal tahun 2000-an kami ikut survey PISA ada butir yang mengatakan kita mengidap kecemasan/ketakutan terhadap matematika dimana kecemasan Indonesia terhadap matematika menduduki peringkat

pertama. Pertanyaannya apa yang dilakukan selama ini? berapa banyak anak-anak yang berhasil dalam nilai matematikanya? saat ini yang terpenting adalah bagaimana kesukaan siswa terhadap pelajaran tersebut harus ditumbuhkan. Jadi para siswa harus “kasmaran” terhadap pelajaran, dan mereka belajar bukan karena mau diuji.

Apa Penyebabnya kondisi ini?

Guru dan sistem. Saat sekarang ini, mutu guru sangat rendah. Ini berdasar hasil survei Kemdikbud sendiri dan *World Bank*. Sistem seperti Ujian Nasional yang digunakan untuk penentu kelulusan juga sangat tak adil dan tidak tepat diterapkan di seluruh Indonesia. Saat ini mutu layanan pendidikan di nusantara ini sangat lebar spektrumnya, penyeragaman atau standarisasi lulusan jelas kebijakan yang salah dan bahaya. Kedua, UN ini merusak budaya belajar. Anak belajar untuk ujian, bukan karena gairah, ingin tahu

dan kasmaran belajar. Dengan sikap negatif belajar karena terpaksa ini, masyarakat belajar yang merupakan motor pembangunan negara akan gagal total. Untuk mengatasinya, harus dimanfaatkan teknologi informasi guna menyebarkan pendidikan bermutu agar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tak terkecuali di manapun.

Namun jika tidak ada UN bagaimana menstandarisasi mutu pendidikan kita?

Bicara standarisasi, apa yang mau distandarkan, jika kita bicara pendidikan maka harusnya mutu layanan pendidikan yang harus di standarisasi, seperti : jumlah ketersediaan buku sarana perpustakaan, laboratoriumnya, semua memang kalau bisa harus ada standarnya, ruang kelas/fasilitas lainnya harus sebanding dengan jumlah siswa. Itu yang harusnya di standarisasi, bukan orangnya. Jika Ingin menstandarisasi manusia adalah kekeliruan terbesar, itu seperti pabrik saja. Jadi standarisasi dengan UN akan banyak pengetahuan, kearifan lokal yang akan hilang, karena tidak ada yang mau belajar lainnya selain materi yang ada pada UN. Siapa yang mau belajar menari? Untuk standarisasi dan perbedaan mungkin yang perlu adalah antara pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan. Kalau pendidikan kejuruan betul perlu standarisasi. Namun kalau pendidikan umum harus seumum mungkin, apalagi jika Sekolah Dasar (SD) yang akan distandarisasi, ini tidak masuk akal.

Di Singapura ada slogan *"every school is a good school"* karena menteri pendidikannya sadar betul jika pendidikan tujuannya hanya untuk ujian itu tidak benar. Karena efeknya semua sekolah hanya akan konvergen ke satu kecakapan. Sementara negara butuh keberagaman kecakapan, seperti seni, kecakapan komunikasi dan lain-lain dan ini biarlah berkembang. Sekarang ada tendensi sekolah elit dan sekolah jelek itu yang terjadi. Hanya JokoWi (Gubernur DKI) yang sadar hal tersebut, bahwa sekolah tidak boleh ada kasta. Seperti itu seharusnya pemimpin, melihat sesuatu secara fundamental. Sekolah negeri semuanya harus bermutu. Konsep RSBI itu keliru, seharusnya peningkatan mutu pendidikan itu lebih banyak dilakukan di Papua, Wamena dll. Tidak adil jika kondisi sekolah yang kurang layak, namun memakai standar ujian yang sama dengan yang di pusat. Tidak adil jika melihat anak sekolah berjalan dua malam menempuh sekolah dibanding dengan mereka yang di Jakarta berangkat menggunakan kendaraan mewah.

"Standarisasi Pendidikan harus dalam bidang mutunya bukan orangnya, UN mengukur orangnya sementara fasilitasnya belum standar"

Jika di Papua satu guru mengajar semua pelajaran, sementara di Jakarta lebih terfokus, kemudian di rumah ada guru privat. Kebijakan kita selalu berfikir pragmatis akhirnya UN yang diukur bukan hasil pendidikan atau sekolah tapi hasil bimbingan tes. Jaman sekarang orang jadi meremehkan guru, karena hanya guru yang mata pelajarannya di UN - kan lah yang lebih dianggap, mata pelajaran lain diabaikan.

Bagaimana dengan peran Kemendikbud yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan ?

Kementerian Pendidikan seperti raksasa tambun yang bergerak lambat dan makan terlalu banyak. Menurut saya kita harus bergerak melalui cara lain diantaranya dengan cara pendidikan 2.0 atau pendidikan 3.0, khususnya pendidikan secara *online*. Permasalahan pendidikan yang nomor satu saat ini adalah kualitas guru. Orang selalu bilang menunggu kualitas guru membaik? lalu kapan baiknya? orang selalu bilang kita harus seperti Finlandia, mimpi? di Finlandia orang yang menjadi dokter harus terlebih dahulu menjadi guru. Di negara kita terbalik, guru menjadi profesi "terpaksa". Namun saat ini di sudah perubahan latar belakang dan pilihan profesi menjadi guru ada walaupun motivasinya kadang-kadang masih soal pendapatan (uang). Berbeda di Finlandia, meski gaji guru 1/3 gaji dokter, tapi orang lebih memilih menjadi guru karena panggilan. Lalu bagaimana solusinya? sekarang kita harus melakukan pengajaran secara *online* untuk melengkapi kekurangan ini dan kita budayakan cara belajar ini kepada siswa.

Bagaimana hal tersebut bisa menjadi budaya siswa jika tidak semua sekolah bisa mengajarkan?

Justru siswa itu kadang di sekolah tidak "fun". Kitalah sebagai masyarakat yang harus memulai. Pengajaran disini tidak bicara kuantitas tapi kualitas. Saat saya mengajar secara *online* saya bisa mengajarkan kepada ribuan anak. Saya mengembangkan metode belajar secara online di www.pakiwan.com yang sudah diakses oleh ribuan orang. Pertanyaannya apakah saya bisa menjadi vaksin yang bisa mengalahkan guru disekolah, supaya anak-anak jadi suka matematika? tentu bisa. Disini saya melengkapi bukan menandingi. Melakukan yang tidak dilakukan sekolah formal, yaitu membangun gairah belajar, membangun keingintahuan, berkomunikasi dan berfikir kreatif.

Bagaimana dengan kesadaran orang tua agar memahami kondisi dan situasi hal tersebut?

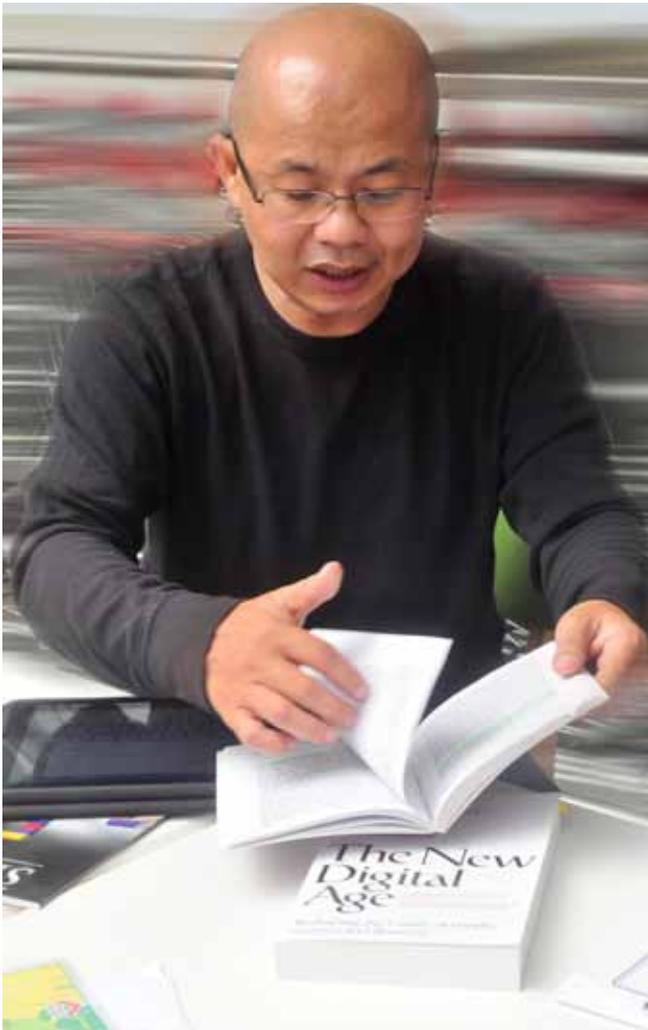
Orang tuanya juga harus dididik melalui gerakan budaya. Bagaimana budaya itu dibangun?

Sekolah-sekolah harus dibiasakan membuat pameran, jadi anak-anak dibiasakan mempresentasikan hasil belajarnya. Supaya mereka memiliki rasa memiliki pelajarannya, jadi anak-anak tidak sekedar belajar untuk ujian.



Bagaimana mengatasi kondisi Dengan faktor kesenjangan antar daerah yang tidak merata dalam infrastruktur pendidikan?

Memang betul cara berpikir seragam yang digunakan dalam kebijakan pendidikan (satu ukuran untuk semua) itu tampaknya sekarang sering tak mulus dalam penerapannya. Memang sebaiknya



IWAN PRANOTO

Sekolah-sekolah harus dibiasakan membuat pameran, jadi anak-anak dibiasakan mempresentasikan hasil belajarnya

kebijakan harus dibuat lebih tidak terlalu normatif, sehingga dapat disesuaikan situasi lapangan. Faktor yang sangat penting adalah menyediakan ketersediaan energi yang mencukupi sampai daerah terpencil, tentunya ini jadi tugas pemerintah pusat. Kemudian infrastruktur untuk informasi menjadi keharusan, barulah bisa dijalankan rencana pembelajaran ini misalnya dengan memberikan fasilitas seperti "tablet" (*notebook*). Kita tidak bisa meremehkan kemampuan anak-anak di semua daerah. Kita bisa melihat contoh, pada tahun 2000an MIT membuat proyek membagikan tablet kepada anak-anak di Ethiopia. Tablet tersebut berisi permainan alpabet, E-book, film, kartun, program menggambar dan program-program lainnya. Tablet hanya diberi tanpa pengajaran, tanpa guru dan tanpa instruksi, sekitar 6 bulan kemudian MIT kembali dan melihat anak-anak tersebut sudah bisa bahasa Inggris (*source: <http://www.technologyreview.com/news/506466/given-tablets-but-no-teachers-ethiopian-children-teach-themselves>*). Berkaca dari contoh tersebut Indonesia sangat bisa menjalankan. Masalahnya bukan di bahan dasarnya namun kesempatannya.

Sebagai bagian dari pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan bagaimana pandangan bapak dengan kebijakan yang sering berubah dalam muatan kurikulumnya, termasuk pelaksanaan kurikulum 2013 ?

Kebijakan lokal atau teknis sering berubah sebenarnya tidak masalah dan kadangkala memang harus. Kebijakan yang lokal ini, seperti kurikulum seharusnya disesuaikan di tingkat lokal atau malah satuan pendidikan, seperti KTSP itu. Namun, kebijakan serta cetak biru strategi pembangunan manusia sejatinya harus lebih kokoh. Kebijakan nasional ini tak boleh sering berganti. Sebaiknya periode kebijakan nasional ini sekitar 15 tahunan begitu.

Kami waktu itu dari ITB jelas ingin pelaksanaan kurikulum 2013 ini ditunda. Di forum majelis guru besar kami setuju membuat kurikulum, walaupun secara pribadi saya tidak setuju, karena menurut saya kurikulum nasional itu *absurd*. Kurikulum adalah cara mengajar, namun pemerintah pusat sok tau dengan kondisi masing-masing daerah. Padahal UU SISDIKNAS sudah mengatur seperti itu (Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan), Karena kurikulum adalah tingkat satuan pendidikan jadi yang membuat harusnya sekolah. Aturannya sudah benar ke arah desentralisasi. Anehnya saat ide menyamaratakan kurikulum muncul, tidak ada yang mengatakan itu salah. Padahal itu melanggar UU. Yang bisa dirubah oleh

Dok. @draCill

pemerintah adalah standar, itupun standar isi dan standar proses, bukannya merubah kurikulum. Maka seharusnya termasuk UN yang digunakan untuk kelulusan tidak tepat, jika UN untuk tujuan pemetaan bisa dilakukan. Parahnya Hasil UN tidak hanya dipakai untuk kelulusan tapi juga akan dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Maka taruhannya semakin besar, hidup/mati, akhirnya guru-guru memaksa muridnya supaya dapat mencapai nilai yang ditargetkan, akhirnya kinerja guru hanya dinilai dari hasil UN. Sekarang pertanyaannya, UN yang digembar-gemborkan sebagai pemetaan apa hasilnya? analisisnya mana, belum pernah ada. Namun DPR atau pemerintah tidak pernah mempertanyakannya ke Kementerian terkait. Laporan hanya sebatas naik atau turunnya nilai.

Apa penyebabnya anak cenderung takut dengan matematika dan IPA, anaknya yang susah menerima atau sistem nya yang tidak bisa menimbulkan semangat dalam belajar?

Masalahnya adalah gabungan dari keduanya, saling melengkapi, kembali lagi ini yang harus kita garap. Kita tidak bisa mengandalkan persekolahan formal. Kita harus bergerak memajukan pendidikan dengan cara masing-masing sesuai keahlian kita masing-masing. Kita buat sendiri yang namanya PLN (*Personal Learning Network*). Jika punya kemampuan mengajar bahasa, lakukanlah, punya kemampuan fotografi bisa mengajar fotografi. Selanjutnya kita menjadi masyarakat yang belajar (*learning society*). Sekarang negara Cina sudah menerapkan hal tersebut dan berhasil memajukan pendidikan dalam kurun waktu 12 tahun, yang digarap pertama adalah pendidikan dasar, kebalikannya dengan di Indonesia. Kami di perguruan tinggi sangat kesulitan mendidik mahasiswa di satu tahun pertama, dimana waktu tersebut lebih banyak digunakan untuk merubah pola pikir mahasiswa, yang mana pola pikir mereka adalah hanya belajar untuk ujian. Namun saat ini kita tidak bicara kuantitas, namun kualitas. Saat kita bicara dengan seseorang hanya satu jam namun inspiratif maka dia bisa jadi akan merubah dunia.

Kenapa ukuran PISA dan TIMS menekankan kemampuan siswa dalam bidang IPA dan Matematika?

Sebenarnya ukuran indikator dalam penilaian PISA itu ada tiga bidang, yaitu bahasa (membaca), matematika dan IPA. Alasannya sampai usia 15 tahun anak harus di ajari konsentrasi pada Ilmu alam, matematika dan bahasa karena disiplin ini kemungkinan salahnya

rendah (dalam hal penilaian dalam pengambilan kesimpulan). Menurut *Schopenhauer* tidak boleh ada anak usia dibawah 15 tahun yang menerima pengajaran pada subjek-subjek yang mungkin merupakan kendaraan dari kesalahan fatal. Kenapa? karena setelah itu anak diharapkan bisa memutuskan sendiri, anak kita harus bebas propaganda. Orang sekarang integritasnya rendah karena tidak bisa bernalar. Ini kembali lagi karena pendidikan IPA dan matematika kita sekarang sangat dogmatis, maka anak-anak IPA lebih mudah dipengaruhi.



Bagaimana jika sistem tidak mendukung?

Kita didik melalui dunia maya. Jika mengutip dari buku “*The New Digital Age (Ditulis oleh Pendiri Google: Eric Schmidt, Jared Cohen)*”, siswa yang terjebak dalam sekolah yang hanya mengajarkan kurikulum yang sempit, hanya menghafal, akan sulit mengembangkan dirinya dan berpikir kritis. Untuk mengatasi ini maka mereka harus memperoleh akses ke dunia maya yang mendukung eksplorasi independen dan berpikir kritis. Makanya saya sangat sepekat dengan pembelajaran yang menggunakan IT dan sistem *online*. Kemudian siaran televisi juga harus mendukung. Saya berharap Bappenas membuat strategi membangun sarana

energi di daerah-daerah terpencil dengan pembiayaan murah. Jika melihat Kementerian Pendidikan saat ini yang kita butuhkan saat ini adalah kementerian yang membangkitkan semangat belajar dan budaya bernalar. Misalnya, kita ganti atau bentuk kementerian budaya belajar. Jika kita lihat saat ini kementerian pendidikan dengan kebudayaan itu terpisah, seharusnya menyatu. Walaupun memang kita melihatnya satu gedung, tetapi secara kenyataannya terpisah. Kebudayaan itu sendiri dan yang diurus selalu menyangkut kesenian, padahal seharusnya yang ditekankan juga menyangkut budaya belajar dan bernalar.

Jika melihat kondisi saat ini, tahun 2015 di era dimana ada 5 sektor jasa yang bebas bersaing, bagaimana SDM kita bisa bersaing di ASEAN?

Menurut saya dengan kondisi saat ini kita tidak bisa optimis, optimis itu bagus, namun optimis buta itu berbahaya.

Kurang berkualitasnya SDM berujung pada kesenjangan ekonomi yang seringkali memicu gesekan sosial, bagaimana menurut anda?

Menurut saya sedikit berbeda, saya berpikir konflik sosial disebabkan oleh kemampuan bernalar dan budaya ilmiah yang tidak dibangun. Di Indonesia anak-anak suka belajar pengetahuan namun tidak membangun budaya ilmiahnya. Jadi belajar fisika sebagai pengetahuan saja. Orang yang belajar sains sejatinya harus bersahaja. Seorang guru datang ke kelas, menuliskan rumus, memberi contoh soal lalu menyuruh siswa mengerjakan, sehingga muridnya menganggap guru adalah sumber kebenaran. Sehingga sains dan matematika di Indonesia di sebut ilmu pasti, padahal tidak. Pengetahuan ilmiah itu adalah sesuatu yang diperbaiki terus menerus, yang terus menerus dipertanyakan. Nah, anak-anak Indonesia itu tidak sempat mempertanyakan, semuanya dijawab oleh gurunya. Akibatnya karakter murid menjadi “pokoknya saya benar, yang lain keliru”. Perlu diingat, anak-anak yang ikut radikal itu bukan anak-anak sosial. Di Indonesia anak-anak yang masuk IPA dengan kondisi pendidikan yang seperti sekarang, gurunya datang dan muridnya cuma patuh mengerjakan, anak-anak tipe ini justru berhasil di Indonesia. Tipe-tipe anak-anak “nakal” malah tidak berhasil karena tidak mendapat “tempat”. Anak-anak yang berpikiran kritis ini malah tidak dapat tempat. Padahal anak-anak seperti inilah yang memiliki potensi kreatif. Sains itu harus berangkat dari ketidakpercayaan yang lama-kelamaan dengan





TELEVISI lebih efektif untuk merangsang anak-anak suka belajar. Maka pilihlah tontonan yang mendidik. Generasi anak-anak sekarang adalah generasi digital (*digital native*), maka cara mengajar yang tepat adalah yang interaktif

pembuktian menjadi tahu karena proses penalaran. Beda dengan agama memang harus dipahami menggunakan iman. Sementara sains tidak bisa diajarkan secara dogmatis. Yang rusak semakin parah adalah dalam penilaian matematika dan IPA, dan malahan IPA yang dihapus.

Apa prediksi bapak hasil kurikulum 2013 yang akan dijalankan?

Berita buruknya, jika membaca Permendikbud kurikulum ini tidak terbaca maksudnya. Tidak dijelaskan kompetensi inti itu apa. Logika dan tata bahasanya tidak sempurna. Guru tidak akan membaca Permen ini, pasti langsung mengacu kepada buku. Berita baiknya, karena kurikulum ini jelek maka tidak ada efeknya.

Bagaimana keterkaitan bidang pendidikan dengan aspek lainnya (kesehatan, sosial dan ekonomi) dalam pembangunan SDM Indonesia?

Pembangunan ekonomi tentu tergantung pada mutu pendidikan. Ini yang harus dicermati. Pendidikan adalah lokomotif pembangunan negara, termasuk pembangunan ekonomi. Sedang kesehatan tentunya tergantung pada mutu pendidikan. Tenaga kesehatan ditentukan ketersediannya serta mutunya oleh mutu pendidikan. Yang sering lalai disorot adalah keterkaitan mutu pendidikan pada kondisi sosial, khususnya kecerdasan kehidupan bangsa. Keharmonisan serta kecerdasan kehidupan bangsa

membutuhkan kecakapan bernalar serta berkomunikasi warganya. Tak mungkin kondisi sosial suatu bangsa baik jika warganya tak memiliki kecakapan bernalar dan berkomunikasi, seperti berdebat dan diskusi yang baik. Dan, dua kecakapan ini dibangun melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan ini juga tak boleh dilihat sebatas persekolahan, tetapi harus dilihat sebagai budaya belajar sepanjang hayat.

Bagaimana dengan orang tua yang sering mendorong anaknya ke bidang keahlian tertentu itu saja ?

Menurut saya tidak bisa seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa *multiple intelligence* (kecakapan beragam) itu bisa dipelajari. Menurut teori *Gardner* bahwa setiap kecerdasan bisa dikembangkan. Kalau saya tidak bisa main gitar bukan artinya saya tidak bisa belajar untuk bisa, walaupun tidak sejago Jimi Page (Gitaris Led Zeppelin). Namun jika saya tidak bisa itu adalah kesalahan saya, dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita bisa melihat orang yang berkebutuhan khusus bisa memiliki kecakapan yang luar biasa diatas orang normal. Intinya bukan faktor bakat-minat, namun gairah kasmaran ingin belajar lagi yang tidak ada. Seorang profesor pernah membuktikan teori ini, kemudian menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan. Dia belajar main gitar setiap hari, dan ternyata teori tersebut benar.

Bagaimana dengan gerakan-gerakan seperti Indonesia mengajar dan banyak gerakan-gerakan budaya lainnya?

Gerakan-gerakan budaya seperti itu memang baik dan banyak namun permasalahannya adalah dukungan politik dan dukungan media yang kurang.

Bagaimana dengan dampak media online dan televisi terhadap anak-anak kita ?

Menurut saya ada juga televisi yang baik seperti Kompas-TV, nah siaran televisi yang sudah baik ini yang harus tetap dijaga konsistensinya. Saya punya cita-cita mengajar di daerah terpencil misalnya Mentawai saat mengajar ada media yang merekam proses belajar mengajarnya, yang mana nantinya bisa jadi referensi untuk disebar ke seluruh Indonesia. Karena jika melalui buku terlalu berat. Media video lebih efektif. Untuk merangsang anak-anak suka belajar paling efektif lewat televisi. Generasi anak-anak sekarang adalah generasi digital (*digital native*), maka cara mengajar yang tepat adalah yang interaktif. Kalau mengajarnya hanya di depan kelas ya tidak menarik, harusnya lewat game dan video. *Game base learning* harus dikembangkan. Sekarang tinggal siapa yang mau membuatnya? yang membuat semangatnya bukan mencari uang, tapi sikap “berbagi”. Dua tahun lalu saya menulis nilai yang penting sekarang adalah nilai “berbagi”. Kita harus mengembangkan nilai “berbagi”, nilai abad ini adalah “berbagi” bukan kompetisi. Contoh nilai berbagi ini adalah awalnya *Google* dibuat adalah untuk membantu anak-anak yang sedang riset supaya mudah mencari referensi. *Facebook* juga, dibuat awalnya tidak untuk mencari uang, dia awalnya dibuat mahasiswa untuk diskusi tugas kuliah. Zaman sekarang berbagi itu mudah karena kecanggihan teknologi komunikasi. Sekarang saatnya orang punya kesadaran itu.

Orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa berbagi. Berbahagia itu bukan mendapatkan sesuatu namun dia dihargai karena berperan dalam kehidupan orang lain. Itulah bahagia. Bahkan Bung Hatta pernah berkata pembangunan itu pada akhirnya bertujuan untuk membahagiakan orang. Itulah *Emotional Intelligence*, bisa berbagi. Mendapatkan sesuatu itu memang



Dok. @draCili

IWAN PRANOTO Saat wawancara dalam suasana santai bersama tim Majalah Simpul Perencana

keharusan, itu *Physic Intelligence*. Pemenuhan kebutuhan fisik memang awalnya, setelah itu kita bisa belajar *mind*. Jadi manusia itu perkembangan kebutuhannya bertahap mulai dari *Physic Quotion (PQ)*, *Intelligence Quotion (IQ)*, *Emotional Quotion (EQ)*, dan terakhir *Spiritual Quotion (SQ)*. *Spiritual* itu kita ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik lagi. Contohnya beli parfum dengan membawa botol bekas padahal tidak dapat apa-apa dari botol bekas tersebut, beli deterjen beli yang *refill*, memang menyulitkan tapi kita rela melakukannya, itulah *spiritual intelligence*, karena manusia pada dasarnya punya niat baik.

Bagaimana dengan dunia perguruan tinggi sebagai gerbang terakhir pendidikan formal sebelum terjun ke masyarakat ?

Sistem perguruan tinggi sekarang juga berbeda dibanding dulu. Dulu SK rektor ditandatangani oleh presiden, sekarang oleh Kemendikbud. Jadi dulu Rektor setingkat menteri. Maka saat ini kampus dianggap administratur saja dan kepanjangan tangan Kemendikbud. Maka dengan sistem seperti ini menjadikan kampus kurang kritis. Begitu juga dengan UN, kenapa UN tetap dilaksanakan, karena Kementerian saat melakukan sesuatu harus punya indikator kinerja untuk di ukur dan salah satu indikator yang mudah di ukur adalah diadakannya UN sebagai laporan angka kepada presiden, karena mudah melihat naik turunnya.

(SIMPUL)



Dr.dr. Deni Kurniadi Sunjaya, DESS
Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan
Masyarakat Universitas Padjadjaran

Saatnya Implementasi Bidang Kesehatan Untuk Pembangunan Manusia

PEMBANGUNAN MANUSIA

“Secara nyata kapitalisme sangat berperan terjadinya implementasi kebijakan, walaupun implementasi kebijakan selalu dikatakan berdasarkan Pancasila”

Salah satu indikator yang dijadikan ukuran atau kriteria dalam menilai Pembangunan Manusia yang dibuat dalam skala atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bidang kesehatan.

IPM Indonesia masih jauh tertinggal di antara-antara negara-negara di dunia, bahkan untuk level di negara Asia Tenggara IPM Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Bagaimanakah sebenarnya Pembangunan Kesehatan di Indonesia saat ini dan ke depan? apa yang sebaiknya dilakukan agar pembangunan SDM Indonesia bisa menjadi lebih baik dan SDM Indonesia siap menghadapi pelaksanaan kesepakatan internasional dalam AFTA, NAFTA dan Masyarakat ekonomi ASEAN ? Berikut pandangan Dr.dr. Deni Kurniadi Sanjaya, DESS, Kepala Program Studi di Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Bandung, kepada Simpul, Bappenas di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Bapak, bagaimana kebijakan pemerintah dalam aspek kesehatan saat ini?

Kalau kita lihat dari sisi kebijakan, kita bisa melihatnya pada 3 proses segitiga yaitu: konteks, proses dan aktor. Aktor adalah rezim yang berkuasa membuat dan melaksanakan kebijakan

tersebut. Konteks ada yang berkaitan mendasar dengan kebijakan. Pertanyaan besarnya adalah apa ideologi kebijakan kita saat ini, khususnya dalam bidang kesehatan? Melihat Pertanyaan yang mendasar ini memang ada tarik menarik antara ideologi Pancasila dengan kapitalisme. Secara nyata kapitalisme sangat berperan terjadinya implementasi kebijakan, walaupun implementasi kebijakan selalu dikatakan berdasarkan Pancasila. Namun kita kan bisa memahami mana yang berlandaskan Pancasila mana yang bukan. Seharusnya sosialisme lebih banyak daripada liberalismenya. Namun dari sisi konten sebetulnya sudah cukup banyak pembangunan manusia yang memperhitungkan aspek kesehatan. Saya melihat hal paling bermasalah saat ini adalah implementasi kebijakan. Hal ini bisa dilihat dengan menggunakan analisis kebijakan siklusnya: masalah, implementasi, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Beberapa hal baik sudah dilakukan hanya saja implementasinya yang belum muncul. Contoh terbesar adalah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), itu adalah kebijakan tahun 2004 yang baru akan dilaksanakan atau di implementasikan tahun 2014.

Kenapa Bapak mengambil contoh SJSN ?

SJSN termasuk kebijakan yang sangat bagus dan sudah lama dibuat dan memang sangat kita tunggu. Kita sudah termasuk terlambat dalam menerapkan kebijakan SJSN ini. Ini disebabkan kita menunggu undang-undang yang menerjemahkan kebijakan tersebut. Undang-undang BPJS kan baru 2011, 7 tahun kita



**DENI KURNIADI
SUNJAYA**

Kalau di Amerika ada pragmatisme apa yang harus di dahulukan dan baru kemudian urusan keadministrasian bisa dilakukan belakangan. Jadi visinya menyelamatkan uang negara atau menyelamatkan anak-anak.

menunggu. Artinya masalahnya diimplementasi kebijakan kenapa lama membuat undang-undang operasionalnya. Kalau dilihat dari sisi teknologi kita juga sudah cukup mampu. Desentralisasi kesehatan sebenarnya sudah benar, namun sayangnya banyak pejabat daerah yang belum paham PP No.38. Seperti penempatan dokter di daerah untuk melayani masyarakat, sudah di daerahkan, maksudnya sudah wewenang daerah. Padahal kalau dilihat dari PP No.38 seharusnya pusat dan daerah bersinergi.

Jika kita masih lemah pada implementasi, apa sebabnya? apakah kelengkapan sarana dan prasarana, sumber daya manusianya, sistem atau programnya?

Menurut saya sebabnya adalah kondisinya, artinya aktornya. Pertanyaan selanjutnya kemampuan atau kemauannya? Salah satu sebab pokok adalah kurangnya para pengambil kebijakan "membaca" instrumen kebijakannya. Bagaimana memahami jika kebijakannya belum dibaca. Seringkali pusat menganggap daerah seolah-olah tidak tahu apa yang harus dikerjakan, padahal mereka (pusat) yang memang belum membaca aturan kebijakannya, seperti PP No.38. Jadi analoginya seperti manajemen toko milik sendiri, berbeda dengan supermarket yang memakai SOP mulai dari manajer sampai karyawan. Kasus lain misalnya, ada beberapa teman

membuat proyek Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Secara substansi kesehatan sudah bagus, secara pembangunan manusia jelas anak-anak harus diberi makanan yang sehat. Tapi apa mau dikata ketika sistem keuangan kita tidak memungkinkan akhirnya program tersebut dicoret. Antara satu Kementerian teknis dengan Kementerian Keuangan sudahkah ada satu pemahaman? Bagaimana membedakan keadaan darurat dan skala prioritas, misalnya, apapun yang terjadi bagaimana bisa melindungi kesehatan anak-anak dahulu ketimbang masalah administrasi. Seperti kondisi di Jawa Barat saat ini, ada banyak sekali anak-anak yang secara ukuran gizi sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan pembangunan manusia 20 tahun kedepan. Tapi proyek kesehatan yang baik ini malah dicoret (program makanan tambahan), hanya karena masalah administrasi keproyekan. Kalau di Amerika ada "pragmatisme" apa yang harus di dahulukan dan baru kemudian urusan keadministrasian bisa dilakukan belakangan. Jadi visinya menyelamatkan uang negara atau menyelamatkan anak-anak. Memang bisa jadi bertentangan dengan

Dok. Dwiyanto

administrasi, tapi kalau tidak ada penyimpangan sebenarnya tidak masalah. Mungkin kita bisa berbeda persepsi karena saya orang teknis lebih mementingkan kepentingan anak daripada masalah administrasi. Karena situasi kita tidak selamanya normal, banyak hal-hal yang tidak normal misalnya kemiskinan, gizi buruk. Jadi kita harus menyiapkan sistem untuk kondisi normal dan sistem untuk kondisi tidak normal. Dibutuhkan pemimpin yang mengambil keputusan cepat di saat tidak normal. Implementasi kebijakan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, seringkali pemerintah pusat dan daerah berbeda keinginan. Contoh lainnya di Provinsi Jawa Barat adalah tentang orang yang mengidap gangguan mental emosional, dari 20% gangguan jiwa berat 0,4% kalau secara nasional yang mengalami gangguan jiwa berat 600 ribu jiwa.

"Satu hal besar yang ingin saya kemukakan, bahwa undang-undang tentang kesehatan sudah jelas menyatakan biaya kesehatan sebesar 5% dibiayai pemerintah pusat dan 10% pemerintah daerah. Namun implementasinya bagaimana?"

Artinya masalah itu ada di sana, sekarang kita lihat berapa anggaran yang dikeluarkan untuk menanggulangi gangguan jiwa berat. Sehat itu berdasar undang-undang nasional dan internasional adalah sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Masih banyak masyarakat yang dipasung, namun ditutup-tutupi. Kami pernah membuat program "survey and respon" mengobati mereka, namun setelah sembuh dan kembali ke rumah penyakitnya kambuh kembali disebabkan aturan yang melarang Puskesmas di daerahnya dilarang menjual obat-obatan yang dibutuhkan. Jadi sistem seperti ini yang harus diperbaiki.

Bagaimana dengan regulasi kebijakan ?

Satu hal besar yang ingin saya kemukakan, bahwa undang-undang tentang kesehatan sudah jelas menyatakan biaya kesehatan sebesar 5% dibiayai pemerintah pusat dan 10% pemerintah daerah. Namun implementasinya bagaimana? pemerintah mengatakan tidak mungkin jika pemerintah pusat membiayai 5%. Yang jadi pertanyaan buat saya jika sudah diundang-undangkan kenapa tidak dilaksanakan dan siapa yang melanggar undang-undang, inilah yang saya maksud kebijakan sudah ada namun implementasi tidak dilakukan. Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan harus berani mengambil resiko.

Bagaimana dengan kondisi di masyarakat terkait dengan kultur hidup sehat, pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit?

Ini menariknya orang Indonesia, setinggi apapun tingkat pendidikannya masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Orang kita berbondong-bondong berobat ke negeri Cina padahal di sana di beri obat yang belum lulus uji terhadap hewan dan manusia. Jadi kita menjadi semacam kelinci percobaan.

Kesehatan menentukan kualitas manusia, bagaimana daya saing kita ke depan jika kondisinya seperti yang Anda ceritakan?

Saya pikir dalam memahami kesehatan ada faktor determinan terbesar yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, demografi dan faktor genetika. Lingkungan dengan perilaku manusia mempengaruhi derajat kesehatan sekitar 75%. Di dalam lingkungan ada lingkungan fisik, sosial ekonomi, budaya juga termasuk diantaranya kebijakan-kebijakan. Kalau kebijakan kita salah maka akan mempengaruhi. Contoh 2004 sudah ada SJSN atau sekian puluh tahun tidak ada asuransi sosial, kebiasaannya sifatnya pemadam kebakaran saja, tiap ada masalah baru bertindak. Akibatnya tidak ada jaminan sosial masyarakat. Padahal di Malaysia sistem jaminan sosialnya berbasis *text base*, sistemnya lebih kearah sosial. Karena dulu dijajah Inggris, kalau dijajah Belanda dibiarkan saja.

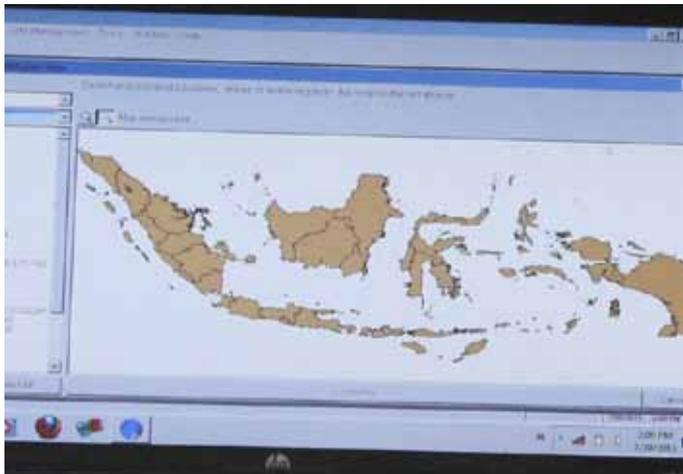
Jadi kalau Inggris lebih mempersiapkan sistemnya. Kalau kita pajak dari kesehatan disetorkan dan kemudian malah hasil pajak tersebut digunakan untuk membangun jembatan. Contoh, pajak rokok yang terbesar mempengaruhi kesehatan, seharusnya kembali untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kesehatan. Yang harus dipikirkan saat melakukan perencanaan adalah harus dipikirkan dan direncanakan secara holistik. Contohnya angka kematian meningkat saat mudik, itu kan karena perilaku sosial namun di hilirnya adalah kesehatan. maka seharusnya kita berfikir holistik, karena kesehatan adalah masalah di hilir. Mengecek kondisi supir itu adalah masalah kesehatan. Waktu kita membangun, pembangunan harus menyatu tidak bisa terpisah-pisah mana ekonomi mana kesehatan. Jadi masalah kesehatan adalah bagian integral dari seluruh masalah pembangunan.



Bagaimana dengan *Human Development Index* (HDI) kita yang masih di bawah negara tetangga?

Kita harus berhati-hati dalam melihat HDI. HDI harus dilihat ukuran-ukurannya kapan. Ketika ada pernyataan angka HDI tahun tertentu, kita harus mempertanyakan HDI nya berbasis pengukuran atau berbasis perkiraan. Misalnya angka harapan hidup yang dirilis tahun ini, datanya kan berbasis lima tahun yang lalu. Artinya jika kita bicara HDI sekarang maka data tersebut adalah hasil pengumpulan data 5-10 tahun yang lalu.

Kalau saya berpendapat HDI untuk evaluasi tapi jangan sebagai *Indicator Impact* mengukurnya. Jadi harus hati-hati.



HEALTH MAPPER

Aplikasi untuk melihat data statistik infrastruktur kesehatan di Provinsi Jawa Barat

Berarti menurut Anda berapa rentang waktu yang dibutuhkan ketika sebuah kebijakan di implementasikan?

Ukurannya, jangan ukuran *impact* tapi memakai *intermediate outcome*. Jadi kalau mengukur jangan sampai sebagai acuan *impact* yang terlalu jauh. Contohnya untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan, di berikan input, ada prosesnya kemudian outputnya misalnya cakupan tenaga kesehatan 90%. *Intermediate Outcome*-nya tinggal apa yang dipilih, yang dilihat angkanya kematiannya bukan jumlah kematiannya. Soal jumlah biarlah sensus yang melakukannya. Jadi kalau mau memperbaiki jangan angkanya namun dilihat masalahnya. Seringkali kita punya angka tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ini adalah tentangan para perencana membuat indikator yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan dengan segera. Determinan perilaku dipengaruhi oleh sosial budaya pendidikan. Contohnya klinik-klinik alternatif yang mengiklankan diri, padahal dokter saja tidak boleh mengiklankan diri karena tidak etis. Namun karena perilaku masyarakat kita, maka mereka berduyun-duyun ke klinik tersebut baik kaya maupun miskin. Ada juga yang masih tidak percaya dengan pelayanan kesehatan modern, ini masalah pelayanan mutu.

Merurut Anda dengan segala permasalahan di atas, apa solusinya?

Menurut saya ada dua hal, saya coba analogikan jika ada kebakaran maka tangani dululah kebakarannya. Yang kedua membangun sistemnya. Baiklah jika kita memberi *charity*, bantuan kesehatan dan lain-lain tapi juga harus membangun sistemnya. Kita harus membangun sistem kesehatan, pilar-pilarnya pelayanan kesehatan harus diperkuat dengan memberi penyuluhan, pendidikan, menyiapkan infrastrukturnya. Apapun yang terjadi, amanat undang undang kesehatan 5% anggaran untuk kesehatan harus dilaksanakan. Pilar kedua adalah SDM penyelenggara bidang kesehatan, penuhi tenaga kesehatannya, jangan sampai ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter, itu tidak standar. Saat ini kita kekurangan data yang valid. Bagaimana perencanaan kesehatan kita jadinya. Pilar ketiga pembiayaannya, asuransi sosial segera dibangun. Pilar yang terakhir pemerintah, tata kelolanya. Ini yang sangat mempengaruhi. Di Eropa isu perubahan iklim yang kelihatannya bukan masalah kesehatan, padahal di hilirnya adalah masalah kesehatan juga, mereka meresponnya dengan membangun sistem kesehatan yang riil. Masyarakat Indonesia ini

adalah masyarakat yang berbeda, berbeda karakternya dengan negara lain, karena variabelnya jauh berbeda, ini yang harus kita semua bantu untuk mendidik masyarakat supaya sadar masalah kesehatan dan lingkungan.

Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan pendidikan?

Jangan dipersepsikan masyarakat yang pendidikannya tinggi itu juga sadar. Malahan sekarang kita lihat orang-orang berpendidikan tinggi banyak mengalami obesitas. Banyak sekali penyakit-penyakit yang semakin banyak pengidapnya. Percuma saja para perencana meningkatkan pembangunan ekonomi sementara meninggalkan pembangunan kesehatan. Misalnya, ada 100 anak yang akan di imunisasi dan yang di imunisasi 80% sedangkan yang 20% tidak, ini percuma karena akan menularkan ke yang 80%. Kalau yang imunisasi 95%, yang 5% bisa terlindungi. Angka-angka ini yang harus terpenuhi.

Masalah kesehatan tidak mengenal strata, seperti dalam permasalahan ekonomi. Namun permasalahan ekonomi bisa menyebabkan gangguan kesehatan juga.

Bagaimana anggaran kesehatan saat ini yang belum sampai 5 % sebagai amanah undang-undang?

Penuhi dulu amanah undang-undang yang 5%. Kalau bicara anggaran saya melihat ada masalah *equity, equality* dan adekuasi. Adekuasi, minimal kebutuhan yang harus dipenuhi.

Bagaimana urutan prioritas bidang kesehatan dibanding bidang lain?

Kalau untuk kepentingan publik harusnya menjadi prioritas nomor satu, jika untuk *private* tidak harus nomor satu. Misalnya

untuk membangun rumah sakit dahulukan membangun yang *primary health care*. Kalau melihat aspek kesehatan jangan dilihat seseorang sehat atau sakit, namun lihat apakah kesehatan itu mempengaruhi produktifitas atau tidak. Pada akhirnya masalah kesehatan akan mempengaruhi aspek lainnya.



Pemerintah harus membuat regulasi yang memperkuat *primary health care*. Pemerintah harus memberi asuransi sosial bagi rakyat. Rakyat juga harus berpartisipasi, yang mampu pun ikut membayar premi asuransi sehingga pasti akan membantu bagi yang kurang mampu



Bagaimana pendapat anda mengenai kesehatan dan pendidikan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Apakah Anda melihat di bidang kesehatan sudah terjadi komersialisme sehingga ada strata masyarakat tertentu tidak bisa mengaksesnya?

Saya prihatin melihat biaya masuk Fakultas Kedokteran semakin mahal, Ini ciri-ciri kita sudah bergeser ke arah kapitalisme dan liberalisme. Kenyataannya saat ini kita berada pada suasana liberalisme dan kapitalisme. *Market based*, ada yang jual ada yang beli. Padahal secara umum 20% kaya 80% miskin, namun karena kita hidup di ideologi Pancasila kita harus mengatasi kegagalan pasar dengan cara memperkuat Puskesmas. Jika ada rumah sakit yang komersil dengan pasar orang kaya ya biarkan saja, namun pemerintah harus membuat regulasi yang memperkuat *primary health care*. Pemerintah harus memberi asuransi sosial bagi rakyat. Rakyat juga harus berpartisipasi, yang mampu pun ikut membayar premi asuransi sehingga pasti akan membantu bagi yang kurang mampu. Sebanyak apapun dana yang dikeluarkan bagi kesehatan akan seperti uang di buang ke lautan karena tidak melihat promotif dan preventif. Pemerintah harus melihat promotif preventif. Cobalah penuh anggaran 5% tersebut. Apa yang terjadi dengan sistem kesehatan kita membuat prihatin, kita tahu apa yang harus dikerjakan namun apalah daya tangan tak sampai. Di masyarakat kita mestinya masalah kesehatan di tangani oleh tenaga terlatih, namun kenyataannya di kota besar pun masih ada yang di bawah standar.

Bagaimana hal-hal yang kontradiktif dapat menghambat bidang kesehatan yang sudah benar di jalurnya?

Secara teknis bisa diatasi jika kita menempatkan sumberdaya yang benar. Dengan berjalannya pendidikan perilaku masyarakat bisa di betulkan, tetapi atmosfer yang membentuk ini semua, jadi negara harus mengkondisikan masyarakat yang tertib. Jadi kalau regulasinya keras yang mendidik, pasti bisa diatur. Jangan sampai peradaban kita mundur. Seringkali pendidikan agama tidak tergambar dalam prakteknya sehari-hari. Negara kita menetapkan kesehatan itu mencakup fisik, mental, sosial dan spiritual, sekarang pada aspek spiritual apa ukurannya? membangun tempat ibadah? berapa yang ke tempat ibadah?

Saya mengambil contoh kasus di Jawa Barat, sekarang akan memiliki 28 kabupaten. Hampir di setiap kabupatennya punya

rumah sakit bahkan ada yang punya dua rumah sakit, ada 5930 desa, strategi kami dalam membuat strategi kebijakan kesehatan. Kita bisa melihat peta Rumah sakit pemerintah yang menangani kegagalan pasar *secondary* dan *tertiary level* rumah sakit-rumah sakit di daerah. Kalau melihat posisinya ini tidak adil, karena yang dipelosok dan perbatasan tidak bisa mengaksesnya. Lalu RS. swastanya juga dalam lingkaran dekat dengan RS. Pemerintah tersebut, dan membayar dokter-dokter yang telah dipekerjakan pemerintah. Kita lihat pemetaan Puskesmas (jangkauan 3 Km) maka seberapa besar dia bisa menjangkau masyarakat. Bisa dilihat dari pemetaan ini, di Jawa Barat saja Puskesmas belum bisa mencakup semua masyarakat. Biaya Puskesmasnya memang gratis namun biaya *oportunity*-nya yang mahal, artinya biaya akses transportasinya jadi mahal. Harusnya aspek perencanaan yang dipikirkan oleh pemerintah daerah juga ada strategi dari pusat harus ada. Ini di Jawa Barat bagaimana di Papua? Inilah ketidakadilan yang terjadi di tempat kita. Ini yang saya maksud kita harus memperkuat sistem kesehatan kita. Belum lagi bicara soal SDM nya. Inilah tantangan kita, kami sebagai akademisi bisa menyampaikan data, fakta, informasi dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan.

Apa strategi nasional yang harus dilakukan?

Aspek lokalitas harus diperhatikan. Jangan menyamaratakan kebijakan ke semua daerah. Karena budaya kita berbeda-beda. Sebenarnya rekomendasi kebijakan sudah banyak yang bagus, namun implementasi yang sulit dilakukan.

Target yang bisa mencapai tahap adekuasi yang ideal berapa lama dan bagaimana mengukurnya?

Satu tahun bisa, syaratnya pemerintah bisa memenuhi anggaran 5% maka daerah bisa 10%. Sekarang ini daerah bahkan ada yang 2% saja, namun pemerintah tidak bisa menegur karena 5% nya belum terpenuhi juga. Taatilah undang-undang, perencana membuat perencanaan dengan baik tapi implementasinya yang tidak dilakukan. Mengukurnya di cari indikator-indikator *intermediate outcome*-nya yang mudah diukur dan cukup sensitif untuk mengukur kinerja, jadi tidak begitu saja memakai angka-angka. Namun untuk pengambilan keputusan harus di cari indikator yang cukup sensitif.

Khusus untuk pembiayaan ada satu yang krusial dan akan sangat membantu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Januari 2014 adalah pemenuhan *universal coverage*. Setiap orang harus memiliki akses kesehatan. Kalau tercapai maka beban kesehatan perorangan akan berkurang karena ada kontribusi masyarakat. Tinggal awasi saja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi fokusnya bukan ke BPJS tetapi ke JKN nya. Kelihatannya ringan namun fundamental secara berpikir. Kita bukannya mau mengurus BPJS namun mengurus rakyat.

Menurut Anda kedepan dengan era keterbukaan, bagaimana kita bersaing kedepannya?

Kita punya penduduk yang besar, pasti ada orang yang muncul secara alami. Namun muncul bukan karena sistem. Tapi seharusnya negara bisa membangun sistem yang bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki sumberdaya yang baik. Jadi negara harus bisa menciptakan sistemnya. Misalnya 10 tahun lagi kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri dalam bidang kebidanan. Maka dibutuhkan SDM yang berkualitas, dibutuhkan sekolah kebidanan, akreditasi dan hal yang mendukung seperti ASI eksklusif di *golden period* dan nutrisi yang baik. Ini sudah mencakup kesehatan dan pendidikan. Jadi kesimpulannya jaga anak perempuan anda sejak kehamilan karena 20 tahun lagi akan menghasilkan SDM. Masalah Gizi pada akhirnya menjadi pendukung. Saya berharap kesehatan menjadi *mainstream* di semua bidang

(SIMPUL)





SIDANG TIM PERUMUS KEBIJAKAN

Dipimpin oleh ketua AP21 Nasional,
Dr. Guspika

Dok. draCill

HASIL SIDANG TIM PERUMUS KEBIJAKAN

Oleh: Haryanto

Wakil Ketua Asosiasi Perencana Pemerintah Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Nasional dengan tema “Strategi Peningkatan Profesionalitas dan Peran Perencana Dalam Rangka Mewujudkan Instansi Perencanaan yang Kredibel” Beberapa isu penting dan pokok yang mengemuka dalam diskusi antara lain persoalan pokok tentang penataan kembali organisasi pengelola perencana dan kedudukan dan mekanisme kerja fungsional perencana serta kebijakan sumber daya aparatur.

Dari hasil diskusi panjang yang dilakukan secara berkelompok dalam membahas 3 isu pokok dalam lokakarya tersebut merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan langkah-langkah penguatan dan kejelasan kedudukan Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

Penataan Kembali Organisasi Pengelola Perencana

Topik 1 Arah kebijakan JFP : Di antara harapan dan kenyataan, Topik 2 Permasalahan dan alternatif kebijakan pembangunan untuk meningkatkan peran JFP dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengertian Organisasi Pengelola Perencana adalah unit/Instansi tempat bekerja (pembinaan teknis) Instansi Pembina Bappenas dan Biro Perencanaan/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal pembinaan perencana, Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam hal pembinaan administrasi. Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I).



Isu Disain Organisasi Teknis

Kajian Kedudukan dan Mekanisme Kerja JFP telah direkomendasi AP2I kepada Bappenas pada Desember 2012. Perlu ditanyakan kembali disain, hubungan kerja, komitmen pimpinan.

Analisis Disain Organisasi Teknis

- JFP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan kelompok ahli perencanaan publik yang keahliannya tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit/ organisasi di mana kita bekerja.
- Kontribusi perencanaan publik bersifat objektif dan tetap

berpegang pada kaidah keilmuan yang dikuasinya, serta terkait dengan bidang tugasnya, yang ditugaskan organisasi kerjanya.

- Perencanaan publik adalah proses menghasilkan dokumen perencanaan yang berkuatan hukum (RPJPN/D, RPJMN/D, RKP/D, Renstra K/L/SKPD, Renja K/L/SKPD dan penugasan lainnya), beserta penyelarasannya yang menghasilkan alternatif kebijakan sesuai dinamika perubahan, sebagai dasar pertimbangan bagi pembuat keputusan.
- Untuk meningkatkan kualitas rencana secara organisasi diperlukan jaminan ketetapan dan pengendalian dari unit/ organisasi pengguna JFP, serta jaminan kesejahteraan Instansi



ANTUSIASME

Para peserta yang hadir pada Lokakarya Nasional AP2I

Pembina dalam menyiapkan kebijakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan masukan AP2I, untuk menciptakan iklim kerja yang berkeadilan selaku pejabat publik yang setara dengan tingkat keahliannya.

- Dalam rangka pembinaan, JFP mendorong (mewajibkan) Peraturan daerah yang terkait dengan JFP. Bappenas mensinkronkan pendanaan JFP, administrasi JFP oleh Menpan dan RB. Kemendagri, Bappenas dan dan RB yang mengatur hubungan kerja JFP di dalam organisasi pemerintah, termasuk insentif.
- Komisariat AP2I wajib menciptakan suasana kerja yang

nyaman bagi para pemangku JFP di lingkungannya, termasuk memberikan informasi bagi karya-karya individu JFP. Dengan pertimbangan kondisi di Bappenas, JFP dan JSP jenis dan sifat pekerjaannya sama dan jumlah pegawai Bappenas sedikit, maka AP2I setuju usulan Sdr. Dedi Brata. Di ESDM sudah ada Permennya tapi tidak dilaksanakan.

- Instansi Perencanaan : fungsi *think-tank*, rencana jangka panjang, wilayah dan makro, analisis isu-isu baru sektoral, PP 38/2007 (NSPK, tentang pelaksanaan teknis). Butir-butir kegiatan di buku hijau Peraturan JFP tidak sinkron dengan tupoksi perencanaan K/L. Sehingga penyesuaian melalui penyusunan juknis internal.
- Jika dibandingkan dengan fungsional dokter di rumah sakit, perencana belum begitu kuat diakui oleh masyarakat. Instansi pemerintah juga belum memakai hasil-hasil perencanaan. Jadi *benchmark* rumah sakit terlalu jauh. Mereka bisa jalan sendiri-sendiri. Sementara perencana antara struktural dan fungsional sama.

Rekomendasi Kebijakan

- Mengingatkan kembali Bappenas, sebagai pembina perencana, tentang rekomendasi AP2I tahun yang lalu tentang Kajian Kedudukan dan mekanisme kerja JFP di pusat dan daerah.
- Merekomendasikan untuk melakukan kolaborasi Bappenas dan AP2I tentang usulan Deputi Menpan dan RB (termasuk pemisahan MenPPN dan Bappenas).

Isu lain yang didiskusikan:

- Kesetaraan jenjang terkait dengan remunerasi di semua instansi perencanaan dengan mempertimbangkan perhitungan metodologi penetapan yang logis.
- Perlu kesetaraan tunjangan yang “berkeadilan” antara struktural dan fungsional, termasuk kepangkatan. Perlu sinkronisasi peraturan-peraturan JFP (buku hijau BUP, SOP, dll) Secara regular perlu ada pertemuan-pertemuan seperti ini (termasuk strategi penyusunan DUPAK dan penilaian angka kredit). Pemintaan pemda DKI ke AP2I.
- Berdasarkan uraian permasalahan, analisis dan rekomendasi ketiga kelompok di atas, Seminar Nasional AP2I ini

merekomendasi beberapa hal sebagai berikut kepada Bappenas sebagai instansi pembina dan instansi pemerintah terkait dengan pembinaan JFP :

- Diharapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat: (1) segera menetapkan pedoman yang mengatur kejelasan kedudukan dan mekanisme kerja JFP di setiap instansi perencanaan di pusat dan di daerah. Dalam hal ini hasil kajian bersama Pusbindiklatren dan AP2I tahun 2012 telah selesai dilakukan (2) Memastikan bersama BKN dan mensosialisasikan surat Sekretaris KemenPAN dan RB kepada Sekda Provinsi Jawa Timur, nomor B/1943/S. PANRB/5/2013 tertanggal 31 Mei 2013, perihal Penerapan Perpres 7/2009 tentang BUP JFP, terkait dengan batas usia pensiun (BUP) bagi PFP Madya dan Utama; dan (3) mengusulkan kenaikan tunjangan jabatan bagi JFP, agar memenuhi prinsip kesetaraan yang berkeadilan, sesuai dengan beban kerja, kelangkaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab dan karakteristik fungsi perencana.
- Bersama dengan Kantor Menpan dan RB dan BKN, Bappenas diharapkan dapat meninjau kembali dan melakukan sinkronisasi berbagai peraturan-teknis pelaksanaan JFP, dimulai dengan melakukan revisi Keputusan Menpan No. 16 tahun 2001, sesuai dengan perubahan perundangan kepegawaian yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, sejak diterbitkannya Kepmen PAN 16/2001, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, substansi ketentuan tentang JFP perlu segera disesuaikan. Dalam hal ini AP2I siap untuk berkolaborasi menyiapkan bahan-bahan kajian akademis yang diperlukan. Bersama dengan Kemendagri, diharapkan Bappenas dapat memperjelas proses perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di provinsi dan di kabupaten/kota, yang mengacu kepada UU 25 tahun 2004, terutama terkait dengan ketentuan pasal 27 ayat 2.

- Sebagai instansi Pembina JFP, diharapkan Bappenas dapat mendorong setiap instansi/unit perencanaan di K/L/D untuk: (1) mendukung fasilitas dan pembiayaan pelaksanaan tugas JFP, termasuk proses perencanaan, diklat, kajian, magang, penulisan makalah, dan penilaian angka kredit; (2) membentuk organisasi/tim penilai angka kredit; (3) membentuk komisariat-komisariat AP2I sebagai organisasi profesi, dan (4) Memfasilitasi pengembangan profesi perencana melalui pertemuan-pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, konferensi, bedah buku, *call for paper*) di bidang perencanaan baik skala regional, nasional, maupun internasional. **(SIMPUL)**

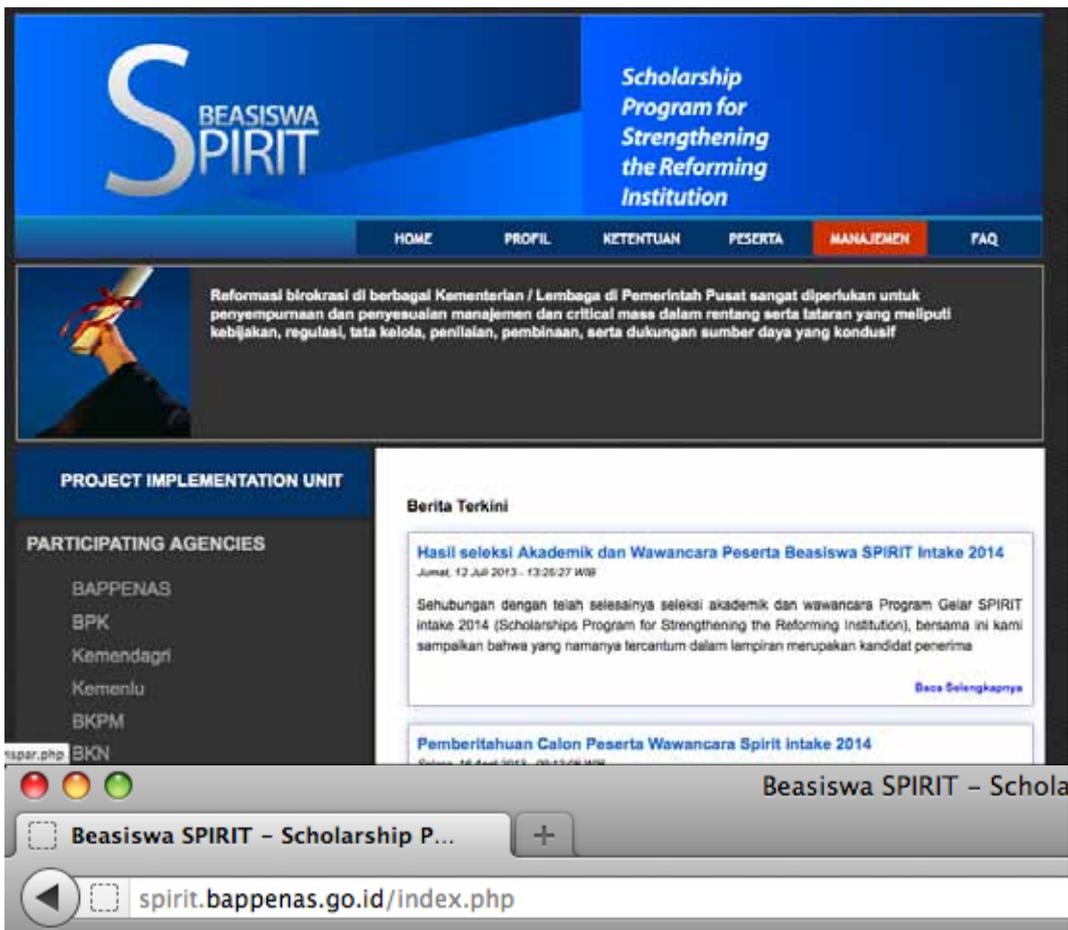




S BEASISWA SPIRIT

INTAKE 2014

Oleh: Zainal Abidin



TRANSPAR
 pendaftar beasiswa
 Spirit Bappenas
 melakukan pendaftaran
 secara online melalui
[http://spirit.bappenas.
 go.id](http://spirit.bappenas.go.id)

Proses seleksi kandidat penerima beasiswa gelar *Program for Strengthening the Reforming Institutions (SPIRIT) intake 2014* telah selesai dilaksanakan sejak edaran penawaran gelar SPIRIT Bappenas tanggal 20 Desember 2012 hingga dikeluarkannya surat resmi kandidat penerima SPIRIT intake 2014 tanggal 10 Juli 2013. Proses seleksi untuk kandidat penerima beasiswa SPIRIT dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap seleksi administrasi, seleksi akademik (TPA dan TOEFL) dan wawancara kandidat. Dalam proses yang dilakukan melalui tiga tahap ini dihasilkan 150 orang kandidat penerima beasiswa SPIRIT. 150 orang kandidat penerima beasiswa SPIRIT 2014 ini berasal dari 10 Kementerian/Lembaga. Mereka adalah kandidat yang berhasil menjadi terbaik dari total 1.057 orang calon yang mengajukan lamaran beasiswa. Kandidat penerima beasiswa SPIRIT intake 2014 tersebut telah berhasil melalui 3 tahapan seleksi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik (TPA dan TOEFL) dan seleksi wawancara.

Salah satu hal yang berbeda dalam seleksi SPIRIT intake 2014 dibanding seleksi intake tahun-tahun sebelumnya yaitu adanya perubahan sistem pendaftaran yang semula secara manual kini dilakukan secara *online* melalui TRANSPAR. Hal ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi pengelola Program beasiswa SPIRIT di *Project Implementing Unit (PIU) SPIRIT* Bappenas untuk menyukseskan program SPIRIT. Tantangan tersebut setidaknya telah membuat pengelola program harus bekerja sebaik-baiknya dan ini menjadi bukti keberhasilan PIU dalam proses seleksi SPIRIT intake 2014. Salah satu indikator keberhasilan proses ini adalah banyaknya pelamar SPIRIT intake 2014 yang berjumlah 1.057 orang dan hampir sebanding dengan jumlah pelamar intake 2013 yang berjumlah 1.050 orang. Proses pendaftaran intake tahun 2013 yang lalu masih dilakukan secara manual dan ternyata minat pelamar tidak menurun dengan perubahan proses pengajuan beasiswa pada tahun 2014 ini.

Pelaksanaan proses seleksi yang dilakukan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses seleksi beasiswa SPIRIT tahun 2014 meliputi (1) proses Seleksi Administrasi, pada tahap ini pendaftar beasiswa SPIRIT Bappenas melakukan pendaftaran secara online menggunakan TRANSPAR sesuai dengan kriteria administrasi yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan administrasi, meliputi: (1). kandidat sudah diangkat sebagai PNS (tanpa pembatasan masa kerja) pada saat mendaftar program beasiswa SPIRIT; (2). kandidat sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 tahun sejak diangkat sebagai PNS; (3). umur maksimal 41 tahun untuk S-3 dan S-2 pertanggal penutupan pendaftaran program beasiswa SPIRIT (4). Indeks Prestasi Kumulatif pendidikan terakhir untuk Ph.D/S-3 Luar Negeri adalah 3,5; S-3 Dalam Negeri adalah 3,25; dan untuk S-2 dalam negeri/luar negeri/Linkage adalah 2,75. Pada tahap seleksi administrasi ini total seluruh pendaftar yang terjaring sebanyak 1.057 orang dengan peserta yang lolos seleksi administrasi sebanyak 694 orang. Kedua (2), proses seleksi akademik, tahapan seleksi akademik meliputi seleksi TPA dan TOEFL yang dilakukan dua hari berturut-turut yaitu pelaksanaan TPA pada tanggal 5 Maret 2013 dan TOEFL pada tanggal 6 Maret 2013. Batas nilai kelulusan minimum yang dipersyaratkan SPIRIT yaitu 565 untuk TPA dan 450 untuk ITP-TOEFL. Total peserta yang lulus TPA dan TOEFL yaitu sebanyak 242 orang. Pada tahap ini, peserta dapat mengetahui status kelulusannya melalui *account* TRANSPAR-nya masing-masing, sehingga transparansi kelulusan tidak ada yang ditutupi. Ketiga (3), peserta yang telah lulus seleksi akademik, kemudian diundang untuk mengikuti seleksi wawancara. Sebanyak 194 orang peserta dinyatakan lulus wawancara dan hanya sebanyak 150 orang peserta yang diusulkan oleh PA dan PIU sebagai kandidat penerima SPIRIT Bappenas *intake* 2014. Seperti halnya pada tahapan seleksi administrasi dan akademik, pada tahapan seleksi wawancara status kelulusan peserta juga dapat diakses melalui *account* TRANSPAR yang dimilikinya. Selanjutnya para kandidat penerima beasiswa SPIRIT Bappenas *intake* 2014 terbagi menjadi S-2 Luar Negeri, S-2 *Linkage* dan S-2 Dalam Negeri. Sementara itu, untuk program S-3 Luar Negeri dan S-3 Dalam Negeri sudah tidak ada dikarenakan masa waktu program SPIRIT akan habis pada tahun 2017.

Selanjutnya, para kandidat penerima beasiswa SPIRIT tersebut dipersilahkan untuk melakukan pelamaran ke Universitas yang ditujunya. Beasiswa SPIRIT memiliki keunikan dibandingkan dengan beasiswa lainnya dimana para kandidat dipersilahkan melamar ke

universitas di seluruh penjuru dunia yang diinginkannya, namun para kandidat perlu memastikan terlebih dahulu kesesuaian *Human Capital Development Plan* (HCDP) di Instansi masing-masing dan akreditasi universitas yang dipilihnya tersebut.

Khusus kandidat penerima SPIRIT *intake* 2014 yang memilih program S-2 Luar Negeri dan S-2 *Linkage*, akan mengikuti *Pre-departure training* (PDT) yang terdiri dari *English for Academic Purpose* (EAP), *Academic Bridging Program* (ABP) dan *Cultural Orientation for Participants Effectiveness* (COPE) dengan durasi *training* tergantung dari hasil capaian skor ITP-TOEFL/IELTS yang dimiliki kandidat. Rangkaian kegiatan PDT terbagi menjadi 3 kelompok yang meliputi PDT 1 selama 9 bulan, PDT 2 selama 6 bulan dan PDT 3 selama 3 bulan. Kandidat yang telah mencapai skor iBT TOEFL /IELTS setara dengan skor international TOEFL ≥ 550 pada saat *pre-departure training* tetap diwajibkan mengikuti *Pre-departure Training* sampai dengan selesai.

Kegiatan PDT untuk *intake* 2014 akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 19 Agustus 2013 bertempat di lembaga bahasa yang terpilih. Selaku PIU SPIRIT Bappenas kami berharap kepada para kandidat yang mengikuti PDT yaitu (1) agar kemampuan penguasaan bahasa Inggris para kandidat untuk akademis (*listening, speaking, reading, writing*) dapat meningkat serta memperoleh memperoleh skor iBT-TOEFL ≥ 79 atau IELTS yang yang dipersyaratkan oleh universitas; (2) Kandidat memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan penekanan khusus pada kemampuan produktif (*Penulisan/Standard of purpose, oral presentations, Research methodology, Statistic, Econometric, Math*); (3) Kandidat memiliki kemampuan wawasan dan pengetahuan tentang budaya dan kehidupan sosial di negara tujuan sehingga kandidat dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Sebagai penutup, PIU SPIRIT mengucapkan selamat kepada rekan-rekan penerima SPIRIT *intake* 2014. Mereka adalah orang-orang terbaik yang diberikan kesempatan untuk belajar dan menjadi agen perubahan di instansi masing-masing sehingga jalannya reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan di negeri ini akan menjadi semakin lebih baik di masa depan. (SIMPUL)

Wawancara

Indonesia identitasnya adalah
Bhinneka Tunggal Ika

Prof. Komaruddin Hidayat
Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Dalam situasi dan perkembangan global dunia saat ini, pembangunan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat bersaing dan memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa. Di samping itu, manusia Indonesia juga harus memiliki karakter, integritas, nasionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Banyak faktor dan bidang yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi manusia yang diharapkan tadi. Salah satunya adalah bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama. Bagaimana pendidikan dan pendidikan agama memberi kontribusi dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, berikut pandangan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komarudin Hidayat kepada Simpul di ruang kerjanya:

Bagaimana Prof melihat Pembangunan, khususnya dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia saat ini ?

Ada satu anekdot bahwa sebelum menciptakan alam semesta ini Tuhan membuat perencanaan terlebih dahulu. Tentu yang bicara seperti itu adalah ahli perencanaan. Ibarat kontraktor sebelum membangun harus mempunyai gambar. Ini menunjukkan bahwa pembangunan apapun akan sangat ditentukan oleh desainnya/perencanaannya/konsepnya. Jika konsepnya bagus dan jelas termasuk dalam perencanaannya maka kita akan bisa mengevaluasi proses capaian realisasi pembangunan. Namun jika konsepnya tidak jelas, kita tidak bisa mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Ibarat sebuah kendaraan yang sudah berjalan, kita tidak punya rencana maka sampai kilometer berapa tidak tahu, kita sukses atau tidak kita tidak tahu. Jadi harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan konsep yang baik.

Bagaimana dengan saat ini, khususnya setelah paska reformasi?

Saya khawatir sejak era reformasi kita tidak punya konsep yang jelas. Dulu ada sentralisasi yang di arahkan oleh GBHN. Namun sekarang ini kekuasaan dibagi-bagi dari tingkat pusat, daerah tingkat I dan tingkat II. Pemerintah pusat kontrolnya menjadi tidak efektif karena kewenangannya dibagi-bagi. Lebih rumit lagi ketika pada tingkat nasional maupun lokal tidak ada sinkronisasi visi yang utuh dalam

“Kita mempunyai aset budaya yang luar biasa. Namun pertanyaannya apakah budaya sebagai aset sudah terpelihara dan berkembang? Indonesia identitasnya adalah Bhinneka Tunggal Ika.”

menjalankan pembangunan. Maka kelihatannya sibuk, anggaran habis tapi dampaknya tidak ada. Kita bisa melihat sejauh mana dampaknya, contohnya mudah sekali, berapa jumlah pembangunan jalan raya? berapa jumlah doktor-doktor bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, saat ini di Indonesia lebih banyak jumlah doktor di bidang ilmu sosial dari pada doktor dalam bidang eksakta. Padahal jika ingin maju seharusnya jumlah doktor bidang *engineering* lebih banyak dari doktor-doktor sosial. Mari bandingkan dengan negara China, India dan Korea. Maka dari situ kalau dilihat dari konsep perencanaan saja sudah salah, belum lagi bicara kualitasnya. Apalagi di era reformasi yang mengemuka adalah kebebasan berekspresi. Artinya yang menonjol adalah wacana demokrasi kebebasan. Namun bidang pembangunan lainnya tidak sesuai dan ketinggalan.

Apa ini dampak reformasi ?

Hasil reformasi yang bisa dilihat adalah pembatasan masa jabatan presiden (sebagai kritik dari orde baru), otonomisasi sebagai kritik dari sentralisasi dan multi partai sebagai wujud dari demokrasi yang tujuannya untuk pemerataan dan mensejahterakan rakyat. Desentralisasi tadinya bertujuan untuk memendekkan layanan sehingga layanan semakin dekat dengan rakyat, sehingga daerah semakin berdaya. Desentralisasi memunculkan para pemimpin dari daerah dengan layanan yang cepat, sayangnya pelayanan masih buruk, pemimpin yang muncul hanya mengandalkan popularitas. Kebebasan ketika tidak dikawal dengan penegakan hukum ternyata



cenderung bunuh diri. Akibatnya rakyat menjadi skeptis dengan tema demokrasi dan reformasi karena tidak mensejahterakan. Banyak kepala daerah, anggota legislatif dan aparat pemerintah yang terlibat korupsi. Sehingga kepercayaan rakyat menurun. Dalam hal ini sebenarnya Bappenas telah mendesain program dan alokasi anggaran agar aparat menjadi instrumen mensejahterakan rakyat. Namun pada prakteknya terjadi banyak kebocoran.

Kelihatannya pemerintah ini sibuk namun tak berdampak apa-apa bagi kesejahteraan rakyat. Untungnya Indonesia dimanjakan oleh Sumber Daya Alam yang berlimpah, sehingga pertumbuhan masih 6%. Kita sudah krisis seperti Yunani. Dari sini saya mengatakan telah terjadi kekurangan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam pembangunan. Sekarang ini kondisinya setiap laporan dari Kementerian yang ditonjolkan adalah angka-angka penyerapan,

tapi dampaknya ke masyarakat tidak terasa. Ukurannya mudah saja, lapangan kerja berapa yang bertambah? infrastruktur berapa? di bidang pendidikan, doktor berapa? sektor industri berapa? industri manufaktur berapa? industri kita kan mengekspor bahan mentah. Ini semua juga disebabkan oleh faktor SDM kita yang belum mampu memberi nilai tambah.

Bagaimana sebaiknya pengembangan SDM Kita ?

Pengembangan SDM intinya adalah meningkatkan jumlah tenaga yang terampil dan produktif. Kita ambil contoh sebuah kursi besi lebih berat dibanding handphone, namun mengapa handphone lebih mahal? ini karena ada investasi sains dan teknologi. SDM yang bagus adalah produk pendidikan dan kebijakan publik yang



Dok. draCill

Komaruddin Hidayat

Pemimpin itu harus tegas, berani dan memimpin dengan hati agar dapat melaksanakan kepemimpinannya.

baik dan sesuai kebutuhan perkembangan negara jauh ke depan. Sekarang ini banyak orang pintar tapi kebijakan publik tidak mendukung sehingga kita menjadi bangsa konsumen. Seharusnya kebijakan publik bidang pendidikan terintegrasi antara pendidikan SDM dengan sektor industri. Ini yang terjadi di Korea Selatan dan Singapura. Alokasi 20% APBN untuk pendidikan hasilnya harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya melihat dalam hal ini Bappenas harus mengambil peran lebih besar. Misalnya, Bappenas harus melakukan kajian terkait pemanfaatan 20% APBN untuk pendidikan. Ibarat petani sudah menanam menggunakan benih, pupuk tapi mengapa tidak panen. Disinilah kesempatan Bappenas mengkritisi laporan dan membuat evaluasi pada negara. Bappenas harus menganalisis proses pemanfaatan anggaran, dan hasilnya bagaimana. Sebagai Badan Perencana, Bappenas harus mengetahui asetnya, programnya, outputnya dan pendukungnya. Bappenas harus lebih kuat dari UKP4. Kalau bicara perencanaan kita harus tahu *assesment asset*, *assesment process*, dan *assesment outcome*.

“Tuhan memberi lautan sebagai tembok untuk Indonesia, yang secara fisik bangsa lain tidak bisa menjajah Indonesia, tetapi kita lupa tidak membangun tembok kebudayaan.”

Bappenas sebagai *think tank* sudah melakukan kajian terkait pembangunan, namun yang dikemukakan adalah hal-hal yang bersifat generik. Kalau di bidang politik dan birokrasi yang buruk jarang mencuat, bagaimana menurut anda?

Negara mau kemana arahnya ada di tangan pemerintah, dan pemerintah yang dipimpin presiden ditentukan oleh rakyat melalui partai politik. Namun jika dilihat kondisi saat ini parpol tidak punya *blue print/masterplan*. Pengembangan SDM parpol juga tidak berkembang. Bappenas harus punya data anggota DPR dari parpol dan melihat bagaimana pendidikannya dan mengkritisinya. Rumitnya pemerintah adalah produk parpol koalisi, akhirnya balas budinya pembagian kursi di kementerian-kementerian. Masalahnya politikus yang duduk di Kementerian tidak paham, karena yang paham adalah aparaturnya, diperparah lemahnya pilar birokrasi. Partai politik lemah dalam hal integritas terhadap pelayanan kepada rakyat. Pertanyaannya adalah bagaimana *grand* desainnya, ini bisa dilihat sebagai tolak ukur keberhasilannya. Dari hasil evaluasi akan bisa dilihat letak kesalahannya, apakah buruknya kualitas SDM terkait dengan parpol yang menempatkan orang yang tidak berkompeten di Kementerian atau apakah terkait anggarannya atautkah kebijakannya.

Bagaimana peran pendidikan dan kebudayaan kita dalam pembangunan SDM ?

Kembali ke perencanaan pembangunan, kita itu mempunyai aset budaya yang luar biasa. Namun pertanyaannya apakah budaya sebagai aset sudah terpelihara dan berkembang? Yang kedua,

Wawancara

Indonesia mempunyai aset sejarah yang heroik dalam memperoleh kemerdekaan, tapi sistem pendidikan kita tidak memeliharanya. Pembangunan Indonesia sekarang ini lebih ke pembangunan fisik sementara pembangunan jiwa tertinggal. Di bidang pendidikan hanya diajarkan kapan Belanda menjajah Indonesia? seharusnya pertanyaannya mengapa Belanda negara yang kecil menjajah Indonesia yang besar ini? Mengapa Jepang yang kecil bisa memproduksi mobil berskala besar sedangkan Indonesia memiliki bahan baku yang berlimpah sebaliknya. Seharusnya pendidikan SDM di sekolah terus mengenalkan tentang budaya membangun karakter dan mencintai sejarah tanah air. Pendidikan juga harus terus meningkatkan kemampuan dan kualitasnya, terutama para guru yang harus mengajarkannya kepada anak didik.

Saya termenung ketika melihat tembok Cina yang terbentang sekitar 6000 Km yang dibangun selama 300 tahun. Pertanyaannya mengapa pemimpinnya mau melakukan itu? artinya para pemimpin mencintai dan membela rakyatnya. Jadi pemimpin harus memiliki visi yang jauh kedepan untuk membela rakyatnya. Kini Cina telah membangun tembok raksasa kebijakan dan ekonomi untuk rakyatnya. Sama halnya dengan Jepang, sebelumnya yang merasa

keturunan dewa matahari dan sebagai bangsa terbaik ternyata setelah di bom atom Hiroshima dan Nagasaki hancur, ketika samurai bisa mati tertembak, mereka terkejut. Akhirnya mereka berpikir bahwa pendidikanlah yang mampu merubah semua itu. sekarang virus pendidikan itu menyebar di Korea Selatan



Apakah kita punya atau harus membangun “tembok” seperti di Cina ?

Tuhan memberi lautan sebagai tembok untuk Indonesia, yang secara fisik bangsa lain tidak bisa menjajah Indonesia, tetapi kita lupa tidak membangun tembok kebudayaan. Bappenas harus punya visi membangun tembok raksasa untuk Indonesia dalam semua bidang.



AKRAB

Kapusbindiklatren
Bappenas (Kiri) saat
mewancarai Rektor
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (Kanan)

Bagaimana peran agama dalam pembangunan manusia?

Agama itu termasuk aset kultural, namun perlu dilihat apakah publik melindunginya, kalau tidak lihat saja perang di timur tengah, agama sebagai alat untuk perang. Artinya yang menentukan bukan agamanya tapi *leadership* atau kepemimpinan. Jika kepemimpinan agamanya lemah, maka agama hanya menjadi alat saja. Jadi dalam sebuah negara modern yang mengatur adalah negara. Agama itu membantu kohesi sosial, memberikan makna hidup, tapi kohesi sosial jika tidak diatur oleh negara bisa menimbulkan pengelompokan sosial sehingga berdampak konflik antar kelompok agama. Agama menjadi “*vote getter*” saat Pemilu, namun yang dibutuhkan untuk mengatur negara adalah kompetensi dan integritas. Nilai-nilai agamalah yang harus ditransfer dalam kebijakan publik dan integritas. Ketika seseorang masuk ke ruang publik yang menonjol adalah kompetensi dan integritasnya, soal nilai berasal dari agama manapun itu soal lain, namun tetap nilai yang menonjol harus integritasnya.

Kondisi saat ini solusinya bagaimana?

Masalahnya adalah manajemen aset. Kita butuh pemimpin yang bisa mengelola aset, dalam hal ini Presiden, para menteri dan parpol. Para pemimpin harus bisa memberdayakan rakyatnya. Parpol sebagai “sumber” yang menyediakan pemimpin, mulai presiden, menteri, dan kepala daerah.

Jika Sumberdaya Parpol lemah bagaimana memperbaikinya?

Parpol termasuk salah satu pilar demokrasi dan dia dapat mempengaruhi pilar lainnya seperti pilar ekonomi, pilar pertahanan dan pilar birokrasi, tapi kondisi saat ini pilar birokrasi kita lemah sehingga dapat dipengaruhi oleh kepentingan parpol. Maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut SDM dan etika di birokrasi harus diperkuat.

Bagaimana untuk mempercepatnya?

Pilar birokrasi kita masih lemah, jika dibandingkan di Cina masih jauh dimana aparat pemerintahnya 80% S-1 ke atas, maka dari sisi pendidikan kita tertinggal jauh di aparat birokasinya. Cina adalah negara yang *powerful* dan sentralistik, artinya pemimpinnya berwibawa. Penurunan kekuatan pilar birokrasi dikarenakan perubahan sistem, dimana sistem dari parpol tidak menghasilkan SDM yang baik dan minim kaderisasi.



Apa positifnya dari reformasi saat ini?

Harus diakui kebebasan berpendapat saat ini adalah prestasi yang luar biasa. Harusnya parpol mampu melahirkan kader-kader untuk menjadi pemimpin yang baik.

Saat ini selera *demand* rakyatnya tidak kritis dan *supply* nya dari parpol juga kurang berkualitas.

Apa pandangan bapak dengan adanya pengangguran terdidik sebanyak 360.000 sarjana saat ini ?

Saya menduga ada aturan birokrasi yang mempersulit para pengusaha membuka lapangan kerja. Alokasi APBN seharusnya bisa dianggarkan untuk membuka lapangan kerja. Kondisi saat ini subsidi 300 triliun hanya habis terbakar untuk BBM. Mestinya subsidi bisa dialihkan untuk mendidik tenaga terampil yang akan di ekspor ke luar negeri.

Banyaknya sarjana menganggur akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pendidikan, bagaimana menurut anda?

Karena kondisi saat ini lebih banyak sarjana lulusan sosial, padahal yang dibutuhkan dunia kerja adalah sarjana *vocational*. Kita bisa dibandingkan dengan India, di beberapa universitas jika seseorang ingin mengambil S-3 bidang *engineering* akan dibiayai penuh. Kemudian mereka disalurkan ke perusahaan dalam dan luar negeri. Cina dan India sudah "*Brain Gain*" kalau kita masih "*Drain Gain*".

Di Indonesia orang pintar kerja ke luar negeri, belum ke dalam negeri. Di luar negeri harusnya menjalin jaringan. Bagaimanapun pendidikan merupakan harga yang membuat bangsa ini naik.

Lalu bagaimana dengan pendidikan di Indonesia?

Saat ini kita sering kali ribut soal-soal yang teknis dan administratif. Sebagai contoh kita sering kali hanya ribut soal UN, para rektor jika rapat sibuk membahas ujian masuk. Harusnya rektor bicara peta kompetitor kita dan lebih visioner terhadap produk. Kampus-kampus besar bisa ditantang untuk membuat mimpi untuk bangsa ini kemudian dibiayai namun outputnya harus bermanfaat besar. Disisi lain, pemerintah seringkali menganggap kampus seperti bawahannya, diperlakukan seperti birokrat, padahal kami (kampus) lebih tahu rumah kami. Kampus harusnya dianggap sebagai aset.

Berkaca dari Cina dan Korea Selatan, seperti apa Indonesia?

Potensi Indonesia sangat menarik, dengan keberagamannya dan potensi untuk pecah sangat sulit. Bahwa pemberdayaan masyarakat menuju bangsa yang besar harus dilakukan melalui kepemimpinan dan sistem ada semacam satir "Indonesia akan maju jika diembargo beramai-ramai". Jangan seperti filosofi "dipangku mati". Karena sekarang ini kita selalu puas dengan pencitraan. Pemerintah harus berpikir kebijakan makro dengan birokrasi yang terus dikuatkan.

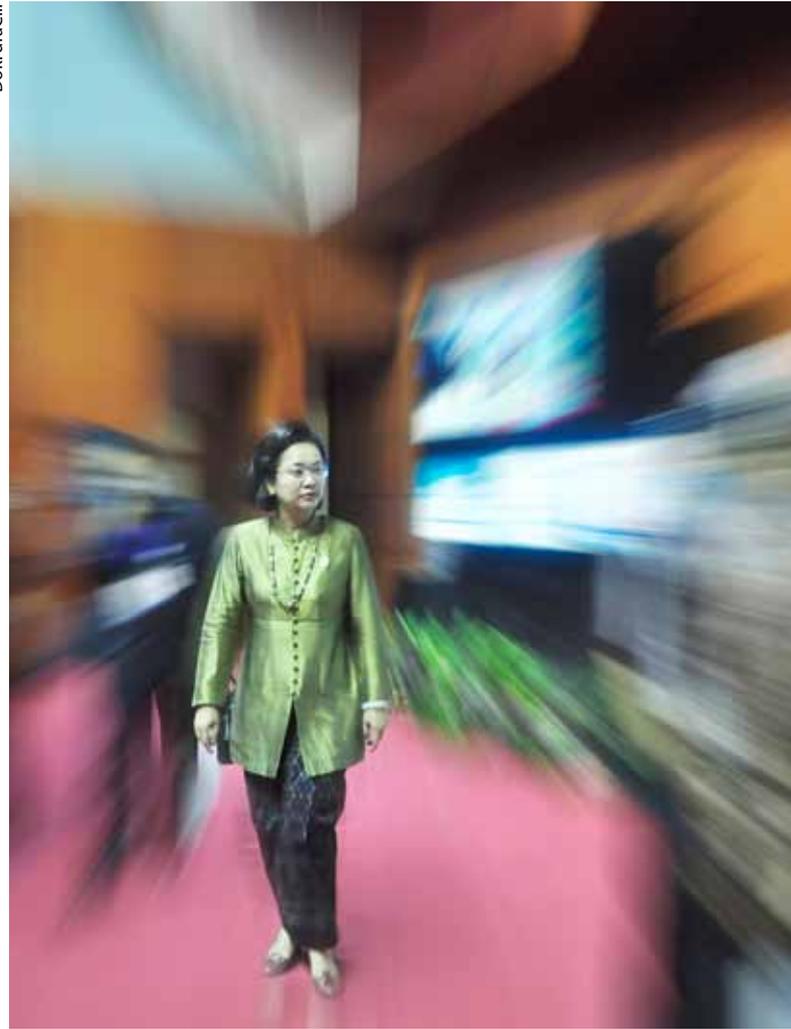
Melihat kondisi saat ini mana yang didahulukan, untuk mengakselerasi percepatan perbaikan di tengah kompetisi global?

Saat ini ada beberapa aktor yang bisa memperbaikinya, diantaranya parpol, banyak juga orang baik yang tidak bisa masuk namun karena sistem sehingga mereka yang baik-baik tidak punya akses. Parpol harusnya bersikap sebagai negarawan, bahwa partai bukan perusahaan namun lembaga untuk rakyat. Dalam perjalanannya seharusnya parpol tidak terus menerus menyalahkan presiden, karena seringkali parpol yang berkoalisi hanya mencari aman. Pemimpin yang sekarang nantinya akan dikenang peninggalannya sebagai apa, seharusnya ada yang diingat oleh rakyat.

Faktor lain adalah media massa, mereka harus punya peranan mendidik pola pikir masyarakat, jangan hanya berorientasi bisnis. Pemerintah juga harus mengambil peran perubahan lewat sistem, terutama MenPAN&RB, Kementerian Pendidikan. Pendidikan harus melihat kebutuhan dunia kerja.

(SIMPUL)

MUSRENBANGNAS
 Menteri PPN/Kepala
 Bappenas, Prof.
 Dr. Armida Salsiah
 Alisjahbana, SE, MA
 saat meninjau
 pameran perencanaan
 pembangunan



Keikutsertaan Pusbindiklatren dalam Pameran Pembangunan Musrenbangnas 2013

Oleh: **Wiwit Kuswidiati**

Seperti tahun-tahun sebelumnya Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), Bappenas berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan 2013 yang diselenggarakan dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013. Keikutsertaan Pusbindiklatren dalam Pameran Pembangunan adalah dalam rangka menjalankan salah satu peran dan fungsi Pusbindiklatren Bappenas yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan JFP, dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan perencanaan di instansi pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan daerah.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pusbindiklatren menyelenggarakan program-program untuk memfasilitasi para perencana di seluruh Indonesia yang meliputi penyiapan berbagai ketentuan tentang kurikulum diklat, uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, organisasi tim penilai, penilaian angka kredit, tunjangan jabatan JFP, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan sosialisasi di seluruh Indonesia.

Sosialisasi adalah satu cara untuk menyebarluaskan informasi program-program yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas dan kunci kesuksesan dalam memberikan informasi terkait dengan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat perencanaan kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten yang menjadi target prioritas Pusbindiklatren Bappenas.

Salah satu cara sosialisasi JFP dan Diklat perencanaan Pusbindiklatren adalah dengan membuka stand pameran Pusbindiklatren dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari keikutsertaan Pusbindiklatren Bappenas dalam acara Musrenbangnas adalah Mensosialisasikan program-program Pusbindiklatren yang berupa penyelenggaraan diklat gelar dan

non gelar, serta pembinaan JFP. Pameran merupakan media yang efisien dan efektif dalam penyebaran informasi kepada *stakeholders*, dan Mendapatkan masukan dan saran dari para *stakeholders* terkait dengan penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren selama ini.

Tahun 2013 Pusbindiklatren membuka *booth* dalam Pameran Pembangunan pada kegiatan Musrenbangnas tahun 2013 yang berlangsung selama dua (2) hari yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 April 2013 di Ruang Binakarna, Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta.

Selama diselenggarakan dua hari, pengunjung *booth* Pusbindiklatren mencapai 500 orang. Sebagian besar dari

pengunjung tersebut adalah yang terdiri dari pengunjung dari K/L, Bappeda Provinsi/Kab/Kota dari seluruh Indonesia.

Antusiasme pengunjung terhadap keikutsertaan Pusbindiklatren Bappenas pada setiap Pameran Pembangunan sangat tinggi, hal ini berarti bahwa selama ini program-program Pusbindiklatren Bappenas sangat disambut baik oleh masyarakat dan sangat bermanfaat bagi pengembangan kapasitas pribadi maupun instansi perencanaan. (SIMPUL)

SOSIALISASI pada Musrenbangnas sangat efektif untuk menjaring minat para calon pelamar beasiswa





RAKOR PRODI

Bertujuan menyamakan persepsi antara Pusbindiklatren dengan para penyelenggara diklat

Dok. draCill

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN DIKLAT GELAR DAN NON-GELAR TAHUN 2013

Oleh: Maslakah Murni

Rapat Koordinasi Diklat Gelar dan Non Gelar 11-12 April 2013 di Bogor yang dihadiri oleh seluruh pengurus program studi baik penyelenggara diklat gelar maupun non-gelar. Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Ka Pusbindiklatren).

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007, disebutkan bahwa Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan program Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan dan perencana pusat dan daerah.

Pengembangkan berbagai bentuk dan jenis kegiatan dilakukan oleh Pusbindiklatren untuk mendukung peran tersebut, yaitu dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan (diklat) gelar dan non-gelar, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana. Program diklat gelar maupun non gelar dilaksanakan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan institusi/lembaga di bidang pendidikan baik nasional maupun internasional. Program diklat gelar meliputi diklat gelar S-2/S-3 dalam negeri; dan S-2 *linkage* yang terdiri atas *linkage* Jepang, *Linkage* Belanda, serta *linkage* Australia. Adapun program - program yang terkait dengan beasiswa gelar yang tersedia di Pusbindiklatren; (a) Perencanaan Publik; (b) Ilmu Ekonomi; (c) Ilmu Lingkungan ; (d) Perencanaan Wilayah; dan lain lain. Hingga tahun 2013 alumni untuk program gelar yang mendapat beasiswa melalui Pusbindiklatren adalah sebanyak 2960 orang yang merupakan beasiswa program S-2 dalam negeri dan sebanyak 21 orang untuk S-3. Sedangkan untuk beasiswa program *linkage* alumninya sebanyak 1284 orang. Sedangkan program

non gelar yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren adalah diklat yang tergantung pada *topical issues* (*Mitigasi Bencana, Pro Poor Planning And Budgetting, dan Green Ekonomi*); diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD reguler dan PPD RPJM), Diklat *Local Economic Resources Development* (LERD), diklat *Public Private Partnership* (PPP), diklat Magang di Jepang, serta diklat *linkage* yaitu diklat *Training of Trainer* (TOT) yang terdiri atas TOT *Disaster Mitigation*, diklat TOT *Green Economy*, untuk alumni program non gelar sebanyak 4854 orang.

Di samping diklat non gelar tersebut di atas, Pusbindiklatren juga menyelenggarakan diklat non gelar penjenjangan yang dimaksudkan untuk para pejabat fungsional perencana (JFP) atau para perencana yang akan memilih Jabatan Fungsional Perencana.

Agar pelaksanaan diklat gelar dan non gelar sesuai dengan kebijakan Pusbindiklatren, maka dilaksanakan rapat koordinasi dengan para pengelola program studi, baik untuk program gelar maupun non gelar. Pelaksanaan rakor ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan Desember pada tahun berjalan. Tujuan dari rakor tersebut adalah untuk : (a) menyamakan persepsi Pusbindiklatren dan para penyelenggara diklat tentang penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar; (b) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program/kegiatan diklat; (c) mengkoordinasikan program/kegiatan-kegiatan agar terfokus dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan lain; dan (d) merumuskan jadwal dan rencana tindak lanjut.

Dalam rakor ini Kapusbindiklatren menyampaikan kebijakan umum pusbindiklatren terhadap pelaksanaan diklat gelar dan non gelar. Untuk tahun 2013 ini program beasiswa gelar hanya meliputi S-2 dalam negeri, S-2 *linkage* Belanda, dan S-2 *linkage* Australia, sedangkan untuk *linkage* Jepang belum diadakan karena program *Profesional Human Resources Development Phase III* (PHRDP III) berakhir pada tahun 2015, sehingga secara administratif dan waktunya sangat tidak memungkinkan. Di samping itu, kebijakan Pusbindiklatren terkait dengan pelaksanaan diklat gelar adalah sebagai berikut:

- Prodi tidak diperkenankan untuk membebani peserta dengan biaya pendaftaran, dan PKL karena sudah termasuk dalam *tuition fee*.
- Prodi wajib membuat laporan pelaksanaan diklat setiap semester, dan disampaikan kepada Kapusbindiklatren, dengan tembusan PPK DM IV Sesmen PPN/ Sestama Bappenas.
- Prodi mengembalikan biaya *tuition fee* yang tidak terpakai, apabila ada peserta yang mengundurkan diri pada saat perkuliahan.
- Perpanjangan MOU antara Rektor dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas
- Program Studi pelaksana *linkage* agar memproses penyetaraan ijazah luar negeri dengan pihak Dikti.
- Kehadiran peserta dalam mengikuti diklat minimal 90%.



Kapusbindiklatren juga menyampaikan mekanisme pelaksanaan diklat gelar dan non gelar termasuk antisipasi yang harus dilakukan apabila terjadi masalah-masalah dalam proses pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat gelar dan non gelar perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat gelar dan non gelar. Terkait dengan pembiayaan, Pusbindiklatren mengingatkan pentingnya program studi dan pelaksana diklat mengetahui mekanisme pembayaran beserta administrasi yang harus dipenuhi untuk akuntabilitas anggaran.

Pada tahun 2013 ini Pusbindiklatren memberikan beasiswa untuk program gelar meliputi S-2 dalam negeri sebanyak 384 peserta; S-3 dalam negeri sebanyak 3 peserta; program *linkage* Belanda sebanyak 60 peserta, dan *linkage* Australia sebanyak 20 peserta. Sedangkan, untuk program non gelar pusbindiklatren memberikan beasiswa untuk diklat PPD reguler sebanyak 50 orang, PPD RPJM sebanyak 275 orang dan *green economic* sebanyak 80 orang. Untuk diklat *Pro Poor Planning and Budgetting* sebanyak 100 orang. Kelayakan proyek sebanyak 20 orang, PPP sebanyak 100 orang; LERD sebanyak 50 orang, TOT *Disaster Mitigation* 25 orang ; TOT *Green Economy* sebanyak 25 orang; sedangkan untuk diklat JFP, Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk Perencana Pertama sebanyak 300 orang; Perencana Muda sebanyak 150 orang; Perencana Madya sebanyak 60 orang; dan Perencana Utama sebanyak 10 orang.

Kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Diklat Gelar dan Non-Gelar tahun 2013, telah menghasilkan beberapa rumusan yang berkaitan dengan Pusbindiklatren dan Universitas/ Program Studi yang bekerjasama Pusbindiklatren termasuk kemungkinan permasalahan (kendala) program atau kegiatan baik Diklat Gelar maupun Non-Gelar selama pelaksanaan tahun 2013. Hal-hal tersebut antara lain mengenai penyamaan persepsi pelaksanaan diklat, alokasi waktu dan mahasiswa serta pembiayaannya.

Mengingat program PHRDP III akan berakhir pada tahun 2015, Pusbindiklatren Bappenas berencana melanjutkan program beasiswa gelar dan non gelar melalui program PHRDP IV. Program PHRDP IV hanya terdapat program gelar yang terdiri dari *Domestic Program* dan *Overseas Program*. *Domestic Program* terdiri dari *Program Master* dan *Doctoral*, sedangkan *Overseas Program* terdiri dari *Program Master*, *Master Linkage*, dan *Doctoral*. Kebijakan Pusbindiklatren terkait dengan pelaksanaan program PHRDP IV adalah:

- Program studi yang telah melaksanakan *Program Linkage* untuk program PHRDP III, harus memperbaharui kerjasama dengan Universitas di Jepang untuk pelaksanaan PHRDP.
- Program studi yang berniat menyelenggarakan program diklat *Linkage* harus mempunyai kerjasama dengan universitas di Jepang, dan harus menyerahkan proposal kepada Pusbindiklatren.
- Universitas wajib mengurus penyetaraan ijazah *Linkage* dengan Dirjen DIKTI
- Penempatan peserta tidak berdasarkan kuota, peserta mendaftar sendiri ke program studi yang bekerjasama dengan Pusbindiklatren.

Rapat koordinasi diakhiri dengan diskusi dan direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Pusbindiklatren dan program studi yang bekerjasama dengan Pusbindiklatren. Rakor juga digunakan untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang telah berjalan/ telah dilakukan dan menyusun program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

(SIMPUL)



PHRDP IV

Pusbindiklatren Bappenas berencana melanjutkan program beasiswa gelar dan non gelar melalui program PHRDP IV.



Dok. draCIII



Dok. draCili

BERSAMA JOKOWI

Peserta dan Panitia Lokakarya nasional berfoto bersama Gubernur DKI

Laporan Dari Lokakarya nasional JFP: “Meningkatkan Profesionalitas Perencana dan Kredibilitas Instansi Perencana”

Oleh: Rita Miranda

Dalam rangka peningkatan profesionalitas para perencana dan kredibilitas instansi perencana se Indonesia maka pada tgl 4-5 Juni 2013 dilaksanakan Lokakarya Nasional (Loknas) Fungsional Perencana di Jakarta. Loknas yang dihadiri oleh Gubernur DKI, Joko Widodo, dilaksanakan oleh Pemprov DKI yang didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Pusat. Loknas ini mengambil tema “*strategi peningkatan profesionalitas dan peran perencana dalam rangka mewujudkan instansi perencanaan yang kredibel*” pada TA 2013.

Lokakarya nasional ini dilaksanakan dengan menampilkan pembicara dari para pimpinan kementerian/lembaga terkait dengan bidang perencanaan dan pengembangan SDM dilanjutkan presentasi dan diskusi seluruh peserta Loknas. Diskusi yang menjadi pokok kegiatan loknas membahas berbagai masalah, isu dan hal yang berkaitan dengan instansi perencana dan para perencana itu

sendiri. Beberapa isu penting dan pokok yang mengemuka dalam diskusi antara lain persoalan pokok tentang *Penataan Kembali Organisasi Pengelola Perencana dan Kedudukan dan Mekanisme Kerja Fungsional Perencana serta Kebijakan Sumber Daya Aparatur.*

Dari hasil diskusi panjang yang dilakukan secara berkelompok dalam membahas 3 isu pokok dalam loknas tersebut merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan langkah-langkah penguatan dan kejelasan kedudukan JFP melalui berbagai peraturan serta mengambil langkah-langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan para perencana, pembentukan komisi-komisi JFP, sinkronisasi aturan dan bersama Kemendagri memperkuat kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di provinsi dan di kabupaten/kota, yang mengacu kepada UU 25 tahun 2004, terutama terkait dengan ketentuan pasal 27 ayat 2.



Dok. draCilli

SOSIALISASI

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof.Dr.Ir.Hj. Winarni Monoarfa, MS (Mengenakan kerudung) bersama Kapusbindiklatren Ir.Yahya Rachmana Hidayat, MSc, Ph.D, pada acara sosialisasi di Bappeda Provinsi Gorontalo

Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Diklat Gelar Dan Non Gelar

Dalam rangka penyebaran informasi Diklat gelar, non gelar dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Pusbindiklatren Bappenas yang dipimpin oleh Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc, Ph.D berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia guna mensosialisasikan program Pusbindiklatren, diantaranya Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta yang hadir dalam sosialisasi berasal dari Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota dan SKPD Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Pusbindiklatren Bappenas juga mengajak mitra penyelenggara diklat untuk mensosialisasikan program studinya untuk menarik minat calon pelamar beasiswa. Penyelenggara diklat yang berpartisipasi antara lain dari MPKP UI, PPIE UI, MPWK ITB, MET Unpad, MEP UGM dan MAP UGM.

Pada sesi dialog interaktif ada beberapa pertanyaan terkait JFP, Diklat Gelar dan Non Gelar. Pertanyaan yang sering mengemuka antaralain: **Pertama** tentang pelaksanaan dan seleksi JFP di

mana pelaksanaan diklat Penjurusan JFP, setiap calon Pejabat Fungsional Perencana disyaratkan untuk mengikuti tes materi (golongan III/c ke atas untuk JFP Pertama dan Muda, minimal golongan IV/a untuk JFP Madya) dan lulus uji kompetensi. Diklat penjurusan bisa dimungkinkan dilaksanakan secara mandiri apabila di suatu daerah dengan peminat yang besar dan mendaftar secara kolektif dengan menunjuk universitas yang telah terakreditasi sebagai pelaksana.

Kedua tentang persyaratan (TPA/TOEFL) bisa dilakukan secara individual/mandiri, selama masih di dalam batas waktu seleksi maka hasil tes secara individual bisa diajukan ke Pusbindiklatren Bappenas. Dengan catatan persyaratan lainnya terpenuhi terutama izin dari instansi yang bersangkutan. **Ketiga** tentang seseorang yang sudah terdaftar sebagai Pejabat Fungsional Perencana kemudian diangkat sebagai pejabat struktural, apakah untuk masuk kembali ke Jabatan Fungsional Perencana perlu mengikuti diklat penjurusan perencana? mengenai penempatan pasca diklat Bappenas selalu menyarankan BKD untuk menempatkan pegawai



Dok. draCilli



DALAM SOSIALISASI

Penyelenggara diklat berkesempatan untuk mensosialisasikan program studinya untuk menarik minat calon pelamar beasiswa.

Besaran tunjangan mengapa pejabat struktural lebih besar? hal ini terkait dengan resiko jabatan terutama bagi pejabat pembuat kebijakan, minimal eselon II. Nantinya besaran tunjangan akan didasarkan besarnya resiko. Angka kredit, untuk pejabat struktural saat ini setiap 4 tahun naik pangkat/golongan, namun kedepan akan berdasarkan kinerjanya (indikator kinerja) jadi belum tentu bisa setiap 4 tahun naik pangkat/golongan. Untuk JFP ukuran kinerjanya jelas, bahkan bisa 2 tahun naik pangkat/golongan. Pada kasus tertentu seseorang telah mengikuti diklat JFP tapi belum diangkat, ini adalah kesalahan BKD dan terkait dengan formasi perencana di masing-masing daerah. **Kelima** tentang widyaiswara apakah bisa mengikuti diklat yang diselenggarakan Pusbindiklatren Bappenas? Bagaimana dengan batasan minimal 2 tahun PNS jika ingin mengikuti diklat? Widyaiswara bisa mengikuti *Training Of Trainer (TOT)*. Batasan minimal 2 tahun PNS adalah peraturan dari Kementerian PAN dan RB. **Keenam** Tentang mekanisme pembiayaan diklat non gelar, mengenai pelaksanaan diklat selama dua minggu apakah bisa dilaksanakan hanya seminggu tanpa mengurangi kualitas dari diklat tersebut? bagaimana mekanisme mengikuti magang di Bappenas. Untuk biaya diklat yang diselenggarakan Pusbindiklatren Bappenas maka biaya diklatnya ditanggung Pusbindiklatren Bappenas, sedangkan SPPD ditanggung instansi pengirim. Apabila ingin dilaksanakan secara mandiri maka bisa melalui mekanisme pembiayaan *cost sharing* dan harus direncanakan anggarannya setahun sebelumnya.

Untuk diklat JFP akan diselenggarakan oleh Bappenas sebagai instansi pembina perencana seluruh Indonesia, dimana Pusbindiklatren menunjuk *center* di universitas yang telah bekerjasama dengan Bappenas.

(SIMPUL)

yang mengikuti diklat di unit perencanaan. Terkait pindah jabatan dari JFP ke struktural atau sebaliknya sangat dimungkinkan. Apabila menduduki jabatan struktural di bidang perencanaan maka angka kreditnya bisa dipakai apabila ingin pindah ke JFP. **Keempat** Apa yang menjadi pertimbangan batasan usia mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas? Terdapat apriori seseorang yang ingin masuk JFP mengenai besaran tunjangan antara pejabat struktural dengan JFP dan mengenai kenaikan pangkat. Pusbindiklatren sedang mempertimbangkan batas usia maksimal 40 tahun menjadi 42 tahun, pertimbangannya adalah masa pengabdian pasca mengikuti studi minimal $2n+1$. (n :lama studi).



Dok. Koleksi pribadi

DI KYOTO JEPANG
Berfoto-foto sejenak
diantara tugas belajar.

Oleh: Harry Susan Pujiraharjo

Alumni Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas di
Program Linkage Jepang

“Tekad itu Membuahkan Hasil”

Ketika pertama kali masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998, dengan pendidikan Diploma 3, sungguh tidak pernah terpikirkan, kalau kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga S.2 bahkan sampai ke luar negeri. Saya sungguh beruntung ditempatkan sebagai PNS di Badan Kependidikan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena

informasi berkenaan dengan beasiswa dan tawaran pendidikan baik pendidikan formal maupun diklat teknis fungsional sangat mudah didapat dan diperoleh. Kesempatan pertama datang ketika saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S-1 di Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Jakarta dengan mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketertarikan untuk melanjutkan studi khususnya di Negara Sakura, bermula ketika pada tahun 2004, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pemuda (JICA-Youth Exchange Program) bidang Administrasi, selama kurang lebih 1 (satu) bulan



SETAHUN tinggal di Jepang telah memberikan kesan yang mendalam, disiplin dalam segala hal bagi orang Jepang merupakan prioritas.

yang telah memberikan pengalaman dan membuka wawasan serta pengetahuan saya tentang negeri sakura. Pengenalan sistem pemerintahan (khususnya bidang administrasi) serta budaya masyarakat Jepang yang saya dapatkan melalui kunjungan ke beberapa kota di Jepang (Tokyo, Osaka, Kyoto dan Iwaki) telah membuat jatuh hati pada negeri sakura. Satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika mengikuti program *homestay* di Shirakawa city, di Fukushima Prefecture, yang telah menjadikan ikatan batin saya dengan Jepang menjadi lebih lekat lagi. Pada tahun 2005, salah satu anggota keluarga angkat saya di Jepang mengalami kecelakaan ketika sedang berlatih kuda, dan dia dinyatakan lumpuh dan tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Keterbatasan biaya untuk menjenguk langsung ke Jepang, memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa untuk dapat pergi kembali ke Jepang dengan cara mendapatkan beasiswa ke Jepang.

Alhamdulillah pada tahun 2005, saya mendapatkan informasi tentang beasiswa Pusbindiklatren Bappenas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 program dalam negeri, luar negeri dan *linkage*. Dengan mantap saya hanya memilih satu program yaitu S-2 luar negeri dan memilih Jepang sebagai tujuan. Berbekal motivasi

yang kuat untuk pergi ke Jepang saya mengikuti seluruh proses dan prosedur seleksi yang diadakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Beberapa tahapan seleksi saya ikuti seleksi administrasi, test TPA, dan test TOEFL. Pengumuman program beasiswa luar negeri kebetulan dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih awal dari program beasiswa dalam negeri. Pada saat pengumuman program beasiswa luar negeri tersebut, nama saya tidak tercantum dalam pengumuman tersebut, walaupun dengan perasaan kecewa saya *legawa* dan tahu diri

mungkin saya belum beruntung untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oleh karenanya ketika pengumuman program S-2 dalam negeri diumumkan saya tidak berminat dan tidak mengakses pengumuman tersebut. Namun kemudian saya dihubungi salah satu staff Pusbindiklatren Bappenas yang menyampaikan bahwa nama saya ada di Program Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya, Palembang.

Terkejut, pasti karena merasa tidak pernah memilih program studi tersebut, dan karena sudah diterima, diharapkan segera untuk melapor dan melaksanakan tugas belajar di program studi tersebut. Setelah berdiskusi dengan pimpinan, kemudian saya mengajukan keberatan untuk ditempatkan di MAP Universitas Sriwijaya, dengan pertimbangan bukan merupakan pilihan program studi dan apabila nilai masih memungkinkan agar ditempatkan pada program studi yang dipilih yaitu S-2 Luar Negeri (Jepang). Alhamdulillah Pusbindiklatren Bappenas mempertimbangkan keberatan saya, dan dikarenakan program S-2 Luar Negeri (Jepang) sudah diganti dengan program *Linkage*, maka kemudian Pusbindiklatren Bappenas menempatkan saya di Program Magister Ilmu Administrasi Brawijaya dan salah satu Universitas di Jepang.

Ketika mendengar info tersebut tidak saja perasaan gembira tetapi juga kebingungan yang luar biasa, karena pada saat itu 2 (dua) hari setelah gempa bumi 2006 terjadi di kota tercinta, Yogyakarta. Kebetulan, rumah yang ditinggali roboh dan salah satu anggota keluarga juga menjadi korban, disisi lain saya harus segera berangkat untuk mengikuti *EAP (English for Academic Purposes)* yang telah berjalan 1 (bulan) lebih. Setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga, dan dengan kebijaksanaan dari Pusbindiklatren untuk mengurus keluarga terlebih dahulu, Alhamdulillah walaupun terlambat 2 (dua) bulan akhirnya saya dapat mengikuti program EAP dan alhamdulillah dapat mencapai nilai yang disyaratkan sebelum program EAP berakhir.

Selanjutnya masa kuliah tahun pertama dilaksanakan di Universitas Brawijaya di Kota Apel, Malang, Jawa Timur. Suka dan duka mengiringi tahun pertama studi di Malang, keterbatasan anggaran dan sarana justru memompa semangat saya untuk menyelesaikan studi, bahkan dengan berbagi komputer dengan satu teman kuliah (yang tinggal satu asrama di Kopma Brawijaya), dan mengikhhlaskan untuk membagi waktu dalam penyelesaian tugas pada waktu dini hari, yang secara tidak langsung juga telah dimudahkan untuk selalu mendekatkan diri pada-Nya.

Pada semester kedua, kami diberikan pilihan untuk *apply* pada beberapa di universitas di Jepang. Saya memilih Ritsumeikan University yang kebetulan ada di Kota Kyoto, Jepang yang merupakan salah satu *Sister Province* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat dimana saya bekerja. Setelah menunggu cukup lama Alhamdulillah beberapa bulan sebelum keberangkatan, saya mendapatkan *acceptance letter* dari Ritsumeikan University.

Satu tahun berjalan sangat cepat dan selanjutnya kami harus kembali ke Jakarta untuk mengikuti BJLT (*Basic Japanese Language Training*) di JCC (*Jakarta Communication Center*) di daerah Kebayoran baru. Serba kebetulan ketika Diploma 3 di ABA Yogyakarta saya mendapatkan mata kuliah bahasa Jepang untuk 2 (dua) semester, begitu pula ketika S.1 di IIP Depdagri pun ekstra kurikuler yang diambilpun kebetulan juga Bahasa Jepang, sehingga berbekal pengetahuan dan pengalaman mengikuti *Youth Exchange Program* selama 1 (bulan) membantu saya untuk memahami lebih cepat ketika mengikuti kursus bahasa Jepang yang dilaksanakan Pusbindiklatren Bappenas di Jakarta.

Detik-detik keberangkatan ke Jepang bersamaan ketika umat Muslim di Indonesia melaksanakan Sholat Tarawih yang pertama pada tahun 2007, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada

“Pengalaman mengikuti *JICA-Youth Exchange Program* di Jepang, membuat saya memiliki tekad untuk kembali belajar ke Jepang dan itu menjadi nyata”.

tanggal 25 September 2007 pukul 00.00 WIB menuju Bandara Narita, di Tokyo. Karena saya muslim, sahur pertama pada tahun itu juga dilaksanakan dalam pesawat yang membawa kami ke Jepang. Alhamdulillah pada pukul 09.00 waktu setempat pesawat kami mendarat di Bandara Narita dengan lancar. Kami dijemput oleh Petugas dari *Asia Seed* (satu lembaga yang bertanggung jawab atas PNS tugas belajar dari pembiayaan Pusbindiklatren Bappenas) dan langsung berpisah dengan rombongan besar teman-teman yang lain ada yang ke Takoshoku, GRIPS di Tokyo, Ritsumeikan University di Kyoto dan Shiga serta Hiroshima University di Hiroshima. Dari Bandara Narita perjalanan dilanjutkan dengan Bus menuju Tokyo Eki (Stasiun Kyoto), dan selanjutnya dengan menggunakan Shinkansen (kereta cepat) menuju ke Kyoto. Setelah menempuh 3 (tiga) jam perjalanan kami sampai di Kyoto Eki (Stasiun Kyoto) kami berpisah lagi dengan teman-teman yang ditempatkan di Ritsumeikan Shiga, sedangkan kami berenam langsung menuju ke Apartemen di Kitano Hakubai-cho bersama dengan personil Asia Seed yang letaknya tidak jauh dari Kampus Kinugasa, Ritsumeikan University.

Saya sungguh bersyukur ditempatkan di Kyoto. Kyoto mengingatkan saya dengan kota tercinta Yogyakarta. Banyak kesamaan yang dimiliki keduanya. Selain sama-sama bekas Ibu Kota di negaranya masing-masing di Kyoto juga ternyata memiliki banyak candi dan obyek wisata yang menarik dan menjadi tujuan wisata baik bagi turis lokal maupun mancanegara. Kebetulan kampus Ritsumeikan yang di Kinugasa, sangat dekat dengan obyek wisata terkenal di Jepang yaitu Kinkakuji Temple (*Golden Temple*), kalau ditempuh dengan jalan kaki hanya kurang lebih 15 menit. Ini menjadikan saya dan beberapa teman lain sering menjadi *tour guide* dadakan ketika ada kunjungan dari beberapa teman Indonesia yang berkunjung ke Kyoto, lumayanlah bisa makan siang gratis.

Hari pertama di kampus, kami dipertemukan dengan dosen pembimbing dan diwawancarai untuk rencana proposal kami (dalam hati kami, baru datang sudah langsung serius nih), Alhamdulillah saya mendapatkan dosen pembimbing (selanjutnya saya sebut sensei) yang baik hati, namanya Masahisa Koyama. Kebetulan salah satu anak beliau kerja di Jakarta pada perusahaan susu milik perusahaan swasta Jepang, Morinaga, wah ini satu keuntungan yang besar buat saya. Kebetulan sensei merupakan salah satu konsultan World Bank yang ahli di bidang ekonomi di Negara-negara ASEAN khususnya di MLVC (Myanmar, Laos, Vietnam dan Cambodia).

Pada hari itu juga, kami harus menyelesaikan administrasi baik di kampus maupun kependudukan karena kalau di Jepang, orang asing seperti kami harus memiliki *Alien Card* (Kartu Penduduk bagi WNA), agak aneh juga ya namanya *alien card*...seolah-olah kita ini berasal dari planet antah berantah...he..he.. Siang harinya kami bersama-sama dengan Senpai (senior) berangkat ke Konsul Jenderal RI di Osaka untuk melaporkan diri. Kami memang lagi beruntung, tidak perlu mengenalkan lebih jauh dengan senior-senior kami karena kami ditawarkan untuk bergabung pada festival internasional Midosuji yang dihadiri Negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Jepang. Tanpa berfikir panjang langsung kami terima karena akan memudahkan kami untuk mengenal lebih dekat dengan senpai (senior) kami yang sudah lebih dulu tinggal di Jepang. Kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ternyata berlanjut, dan menjadi media untuk mempromosikan

budaya Indonesia di negeri Sakura. Selain festival Midosuji, kami juga ikut mewarnai dalam beberapa festival lokal baik yang dilaksanakan dalam lingkup kota Kyoto maupun di internal kampus.

Kesempatan tinggal di negeri Sakura, betul-betul saya manfaatkan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Jepang. Selain mendapatkan mata kuliah *Japan Public Administration* dan kursus Bahasa Jepang bagi mahasiswa asing di kampus, kami juga diberikan fasilitasi untuk memilih seorang volunteer (orang Jepang), yang sangat membantu dalam menghadapi kehidupan di Jepang, dengan mengedepankan simbiosis mutualisme kami barter informasi baik bahasa, budaya ataupun pengetahuan lainnya. Atas bantuan rekomendasi Biro Kerjasama Setda Provinsi DIY dan kebaikan sensei, Alhamdulillah saya dapat berkunjung dan mempelajari secara langsung sistem pemerintahan yang ada di Kyoto Prefecture, sehingga dengan mudah saya mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian tesis. Saya mengangkat masalah Kerjasama Sister Province antara Provinsi DI Yogyakarta dan Kyoto Prefecture. Ada temuan yang cukup menarik dalam tesis saya, bahwa ternyata salah satu motivasi adanya kerjasama antara 2 provinsi dari 2 negara yang berbeda tersebut adalah adanya hutang budi Gubernur Hayashida (Gubernur Kyoto yang menginisiasi kerjasama), pada waktu menjadi salah satu Komandan Pasukan Jepang yang ditempatkan di Yogyakarta pada Perang Dunia 2, pada saat itu beliau ditawan oleh tentara Belanda dan atas bantuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beliau dapat bebas dari tawanan Belanda. Temuan ini tidak pernah



saya temukan di dokumen kerjasama yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan Kyoto, tetapi justru secara lisan dipahami dan selalu dikedepankan oleh orang-orang yang ada di Kyoto Prefecture, ini mengandung arti bahwa orang Jepang sangat menghargai dan menghormati jasa orang lain.

Setahun tinggal di Jepang telah memberikan kesan yang mendalam, khususnya pada perilaku dan kebiasaan orang Jepang. Disiplin dalam segala hal bagi orang Jepang merupakan prioritas. Mereka sadar sepenuhnya bahwa dengan disiplin akan melancarkan segala urusan dan tidak menjadikan orang lain dirugikan atau disakiti. Banyak contoh yang menggambarkan bagaimana masyarakat Jepang “mendewakan” disiplin, disiplin waktu misalnya. Bagi orang Jepang, keterlambatan tanpa kabar berarti akan membuat orang lain khawatir dan berfikir pada hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, sakit atau halangan yang menyulitkan. Sehingga ketika seseorang tidak bisa menghindari keterlambatan, mereka akan memberikan kabar terlebih dahulu. Apabila mereka membiarkan keterlambatan tanpa pemberitahuan apapun adalah suatu kesalahan besar karena dianggap tidak menghargai perasaan orang lain. Kebiasaan orang Jepang untuk menghindari keterlambatan adalah datang lebih awal dari waktu yang disepakati. Nampaknya Pepatah Jepang “*Kunshi wa hitori otsutsa shinu*” (orang hebat selalu menjaga perilakunya, meskipun sedang sendiri) menggambarkan bagaimana orang Jepang mengedepankan disiplin dan tidak mau mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk melanggar aturan. Ada sebuah kasus yang cukup menarik yang pernah saya temui untuk menggambarkan hal ini:

“Jepang merupakan negara yang cukup liberal untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi melalui internet atau mediana. Namun demikian jangan coba-coba

mengakses situs-situs porno pada saat jam kerja. Seorang pegawai negeri di Jepang berhasil mengunjungi 780.000 alamat situs porno melalui komputernya saat jam kerja. Akibatnya ia harus rela turun jabatan sekaligus penurunan gaji USD190 setiap bulannya”

Saya juga sempat agak heran di negeri yang tidak mendewakan agama sebagai jalan hidupnya tetapi ternyata pelanggaran moralitas pada waktu jam kerja ternyata masih ada sangsinya. Kirakira kalau ditempat kita bagaimana ya?

Suka dan duka mengiringi masa-masa studi di negeri Sakura. Begitu banyak suka yang menjadikan saya sulit mengungkapkannya. Sedangkan duka, ketika harus menjalani masa-masa sulit jauh dari keluarga dan bahkan kehabisan air mata dan kecewa yang mendalam ketika tidak bisa melihat wajah ayahanda tercinta yang terakhir saat beliau menghadap yang maha kuasa karena harus tetap tinggal untuk menyelesaikan studi.

Tibalah saatnya ibu pertiwi memanggil kembali, setelah selesai studi di negara Sakura kembali dengan segenap harapan dan mimpi yang tinggi untuk memperbaiki negeri. Namun apa daya masih belum optimalnya penempatan pasca diklat bagi PNS tugas belajar menjadikan harapan tinggal harapan. Tinggal secuil harapan sederhana setelah saya kembali ke tanah air hanyalah saya akan berusaha membiasakan kebiasaan yang serba teratur ketika di Jepang untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari minimal untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan, dan Insya Alloh saya sangat percaya ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja saya pribadi sebagai seorang PNS pada khususnya dan peningkatan mutu kualitas layanan pada masyarakat pada umumnya .

Saya berharap ke depan, Pusbindiklatren Bappenas dapat memfasilitasi bagi PNS tugas belajar khususnya di daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan ilmu yang sudah diperolehnya di mancanegara, dengan memberikan masukan kepada pengambil keputusan di daerah untuk lebih memberdayakan PNS tugas belajar sesuai dengan latar belakang keilmuan yang diperolehnya dengan tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan organisasi.



Dok. Koleksi pribadi

MOMORABILIA

Semasa kuliah



EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KOTA METRO

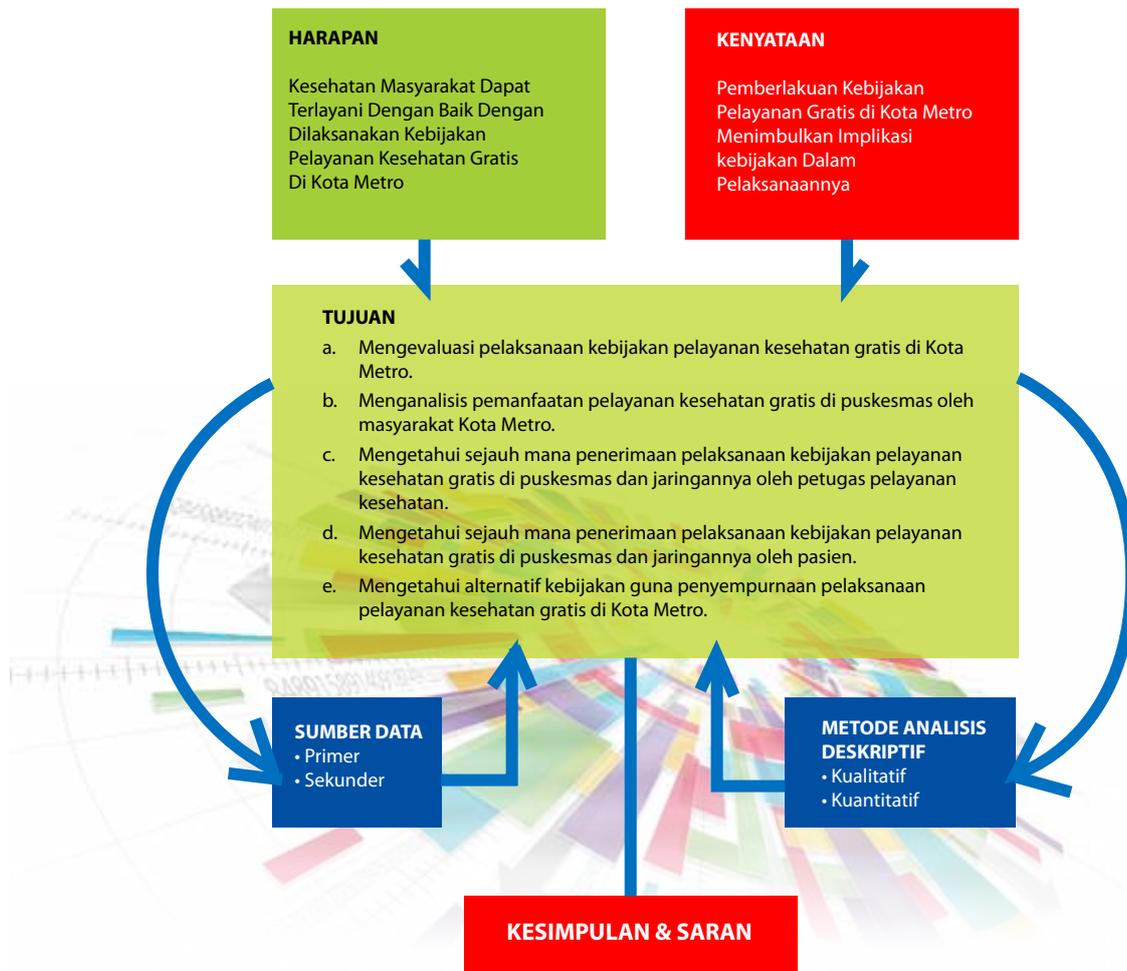
Oleh: Arivanda Jaya

Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Kekhususan Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah

Tesis ini membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro yang ditinjau dari pelaksana kebijakan dan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kota Metro yang dikaji berdasarkan aspek kebijakan, aspek manajemen pelayanan, aspek administrasi keuangan dan aspek kepesertaan. Menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas oleh masyarakat Kota Metro. Mengetahui seberapa jauh penerimaan baik dari petugas puskesmas dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mengetahui alternatif kebijakan guna penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah

Kota Metro dapat melakukan pengendalian pelayanan kesehatan gratis dari dua aspek yaitu pada sisi *supply* melakukan perubahan pembayaran biaya pengganti jasa medis yang menggunakan *fee for services system* dengan menggunakan sistem kapitasi. Pada sisi *demand*, melakukan pembatasan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis berdasarkan tempat tinggal, usia dan paket – paket pelayanan yang di jamin serta melakukan kembali sosialisasi kebijakan mengenai sasaran dan paket pelayanan yang ditanggung baik kepada masyarakat dan petugas kesehatan di puskesmas. Perlu Pelayanan Kesehatan daerah di Kota Metro.

KERANGKA BERPIKIR



Kesimpulan Penelitian

Evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro, pada Aspek Kebijakan, konsistensi keterjaminan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis masih di ragukan karena hanya didasari oleh peraturan walikota dan persetujuan DPRD Kota Metro. Pada Aspek Manajemen Pelayanan, mekanisme pemberlakuan *reward* dan *punishment* pada pelayanan kesehatan di puskesmas masih kurang ditegakkan. Pada Aspek Administrasi Keuangan masih kurang baik dikarenakan masih adanya paket pelayanan

kesehatan yang tidak termasuk dalam paket yang ditanggung pelayanan kesehatan gratis masih lolos verifikasi. Pada Aspek Kepesertaan, sistim yang mempergunakan KTP dan KK dalam membedakan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pelayanan kesehatan gratis masih kurang efektif dikarenakan masih adanya pasien yang tidak termasuk sasaran dapat memanfaatkan pelayanan ini;

- Berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan gratis puskesmas di Kota Metro tahun 2009 terlihat bahwa untuk pelayanan rawat jalan lebih banyak dimanfaatkan oleh pasien yang bejenis kelamin perempuan sebesar 61,4% dan pasien yang berusia produktif 15 – 64 tahun sebesar 53,5% dan yang berdomisili dalam wilayah puskesmas sebesar 60,6% namun pasien yang berasal diluar wilayah puskesmas cukup tinggi

memanfaatkan pelayanan ini sebesar 39.4%. Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan memiliki pola yang sama dengan pelayanan rawat jalan akan tetapi lebih dominan dimanfaatkan oleh pasien yang berasal dalam wilayah puskesmas sebesar 87,5%. Untuk rata – rata utilisasi pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya per bulan di Kota Metro tahun 2009 sebesar 17,88% dengan utilisasi terendah sebesar 14,82% sedangkan tertinggi sebesar 20,53%, hal ini masih dibawah target utilisasi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Metro yaitu sebesar 20% per bulan, namun apabila dibandingkan dengan standar nasional hal ini masih diatas standar normatif pelayanan rawat jalan yaitu 15%. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap tingkat utilitasinya rata – rata sebesar 0.017% per bulan dan masih dibawah standar normatif nasional yaitu 1,54% yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana pelayanan ini belum efisien;

- Respon petugas kesehatan dengan terhadap pemberlakuan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di puskesmas masih ditanggapi pro dan kontra akan tetapi petugas kesehatan di puskesmas menerima kebijakan tersebut sebagai kepatuhan menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro cukup baik yaitu sebanyak 95% masyarakat setuju dengan pemberlakuan kebijakan pelayanan kesehatan gratis. Adapun kesediaan pasien dalam membayar premi atau iuran jika Pemerintah Kota Metro ingin mengembangkan sistim jaminan kesehatan daerah sebanyak 54,9% bersedia membayar iuran premi Rp1.000/jiwa/ bulan dan 45,1 % bersedia membayar premi > Rp.2000,-. Tingkat kepuasan reponden dalam pelayanan

kesehatan gratis sebesar 73% hal ini melebihi target dari Dinas Kesehatan Kota Metro yaitu 70%. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan analisis Importance Performance Analysis, aspek – aspek yang menjadi prioritas untuk diperbaiki meliputi : Kecepatan tindakan perawat dalam pelayanan yang diberikan, Perhatian tenaga perawat dalam menanggapi keluhan pasien, Kecepatan tindakan Dokter dalam pelayanan yang diberikan, Keramahan petugas administrasi dalam melayani pasien, Waktu Buka Pendaftaran pelayanan tepat waktu, Kelengkapan alat – alat medis di puskesmas, Kejelasan informasi yang diberikan petugas farmasi

Rekomendasi Kebijakan

- Pemerintah Kota Metro dapat melakukan pengendalian pelayanan kesehatan gratis dari 2 aspek yaitu pada sisi *supply* melakukan perubahan pembayaran biaya pengganti jasa medis yang menggunakan sistim klaim atau *fee for services system* dengan menggunakan sistim kapitasi. Pada sisi *demand*, melakukan pembatasan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis berdasarkan tempat tinggal, usia dan paket – paket pelayanan yang dijamin dalam pelayanan kesehatan gratis.
- Perlu dilakukan kembali sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro mengenai sasaran dan paket pelayanan yang ditanggung baik kepada masyarakat dan petugas kesehatan di puskesmas.
- Perlu dilakukan kajian mengenai pengembangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kota Metro menjadi sistim jaminan kesehatan daerah di Kota Metro.





SOLUSI ATAS KETERGANTUNGAN IMPOR

“Harus ada terobosan-terobosan kreatif dalam rangka menciptakan peluang berusaha,”

Oleh: Ilyas Alimuddin

Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Perencanaan & Pembangunan (EPP) Universitas Hasanuddin

Pembatasan Impor sering dianggap sebagai biang keladi terjadinya kelangkaan komoditas dalam negeri, akan tetapi hal tersebut hanyalah usaha yang sia-sia menyalahkan faktor eksternal. Tentu saja pembatasan impor adalah penyebab langsungnya akan tetapi kesalahan yang sebenarnya adalah pada kebijakan yang tidak mampu mendorong petani di dalam negeri untuk mampu memproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Masalah impor kembali meresahkan

masyarakat, maka tidaklah mengherankan jika Presiden mencurahkan kemarahannya di media massa kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan yang dianggap tidak sanggup mengatasi masalah kelangkaan yang menyebabkan kenaikan secara signifikan seperti dalam kasus harga komoditas bawang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga komoditas sangat tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

Hukum ekonomi yang sudah pasti bahwa ketika permintaan tinggi dan kuantitas barang yang ditawarkan rendah maka sudah dipastikan harga akan naik. Kondisi inilah yang terjadi sekarang, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk pembatasan impor komoditas hortikultura, maka pada saat itulah komoditas tertentu akan terbatas di pasaran karena memang selama ini ketersediaannya ditopang dari produk impor.

Secara pribadi penulis sangat setuju dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembatasan impor untuk komoditas pertanian. Karena dengan kebijakan ini pastinya akan sangat membantu serta mendorong produktifitas petani yang pada gilirannya dalam jangka panjang akan menciptakan kemandirian ekonomi negara.

Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah bahwa ketika melakukan pembatasan impor maka mesti diparalelkan dengan kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Kebijakan pembatasan impor tidak boleh dilaksanakan secara parsial, tapi mesti secara simultan melingkupi kebijakan sektor lainnya, karena jika tidak maka yang terjadi adalah seperti yang dirasakan sekarang, kelangkaan komoditas yang berimplikasi terhadap kenaikan harga.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih sebanyak 29.136 ton atau 18,21 persen dari rekomendasi Kementerian pertanian sebanyak 160.000 ton bawang putih (FAJAR, 13 Maret 2013). Ini merupakan sebuah langkah mundur yang diambil oleh pemerintah, karena sebelumnya telah mengambil kebijakan pembatasan impor komoditas hortikultura. Bukankah tujuan utama pembatasan impor yang dilakukan adalah untuk memberdayakan petani lokal serta mencapai kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Jika pemerintah kembali membuka impor sama halnya kembali lagi ke titik nol dimana harapan untuk menciptakan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai.

Menjaga kestabilan harga dalam negeri menjadi justifikasi untuk melegitimasi kebijakan mengimpor bawang yang harganya semakin melonjak naik. Dalam jangka pendek mungkin saja kebijakan tersebut ada benarnya, akan tetapi dalam jangka panjang pastinya swasembada pangan atau kemandirian ekonomi yang selama ini dicita-citakan akan semakin jauh dari kenyataan. Permasalahan impor yang selalu melanda mestinya memberikan kesadaran bahwa

“Impor seakan menjadi senjata pamungkas untuk meredam lonjakan harga. Padahal pada hakikatnya masih banyak kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah”

ada yang salah dengan kebijakan tersebut. Menggantungkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari impor adalah sesuatu yang sangat naif karena negeri ini adalah negeri agraris.

Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang kurang populer, seperti halnya tetap konsisten dengan kebijakan pembatasan impor di saat terjadi kelangkaan produk di pasar. Walaupun dengan kebijakan tersebut mungkin saja berimplikasi pada pencitraan pemerintah menjadi kurang bagus. Mengorbankan citra demi kepentingan rakyat bukanlah sesuatu yang buruk.

Ketika pemerintah mengambil kebijakan pembatasan impor, maka pada hakikatnya pemerintah sudah mengetahui konsekuensi yang akan timbul atas kebijakan tersebut. Masalah kelangkaan pasti akan terjadi, oleh karena itu pemerintah semestinya jauh hari sebelumnya sudah memiliki langkah-langkah antisipatif. Tidak seperti sekarang, seakan-akan pemerintah terkesan dalam posisi terdesak dan pilihan

kebijakan yang bisa ditempuh hanyalah dengan membuka kembali kurang impor.

Pembatasan impor dalam realitas mampu mendorong produktifitas dan pemberdayaan petani lokal seperti yang kurang menjadi pertimbangan pemerintah. Impor sudah pasti mematikan kreatifitas petani lokal. Impor seakan menjadi senjata pamungkas untuk meredam lonjakan harga. Padahal pada hakikatnya masih banyak kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah. Langkah *Pertama* yang paling penting yang mesti dilakukan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas petani. Kebutuhan dalam negeri mestinya mampu dipenuhi oleh petani lokal. Ekspektasi ini bukanlah hal yang mengada-ada. Lahan yang sangat luas ditambah sumber daya manusia yang sangat besar menjadi modal yang semestinya mampu dimanfaatkan dengan baik.

Kedua, Untuk meningkatkan produksi, pemerintah seharusnya banyak memberikan subsidi kepada petani seperti bantuan pupuk, bibit, traktor, pestisida atau bahkan pemerintah bisa memberikan bantuan lahan dengan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah yang selama ini menjadi lahan menganggur untuk dihidupkan oleh petani.

Ketiga, melakukan Program pendampingan atau penyuluhan kepada petani. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar petani seperti di Sul-Sel tingkat pendidikannya masih rendah, karenanya para petani masih menggunakan cara tradisional dalam mengelolah lahan, maka sangat wajar jika produktifitasnya sangat rendah.

Keempat, mesti ada regulasi yang mengatur mengenai alih fungsi lahan pertanian. Masifnya pembangunan saat ini berpengaruh terhadap banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, areal industri atau kawasan perhotelan dan lainnya. Hal ini sangat mendesak dilakukan karena untuk melakukan penambahan areal persawahan yang baru sungguh sangat sulit.

Selain itu langkah strategis yang sangat mendesak untuk ditempuh adalah penerapan dan aplikasi teknologi modern pertanian. Sebagai ilustrasi sederhana bisa mengambil contoh dari Jepang. Dengan penerapan teknologi modern, setiap tahun Jepang mampu mengekspor 6 juta ton beras dengan *high quality* padahal masyarakat Jepang terkenal pengkomsumsi beras yang sangat tinggi dan lahan pertaniannya juga cukup sempit.

(SIMPUL)





Cerita dibalik cover Simpul Perencana Vol.20

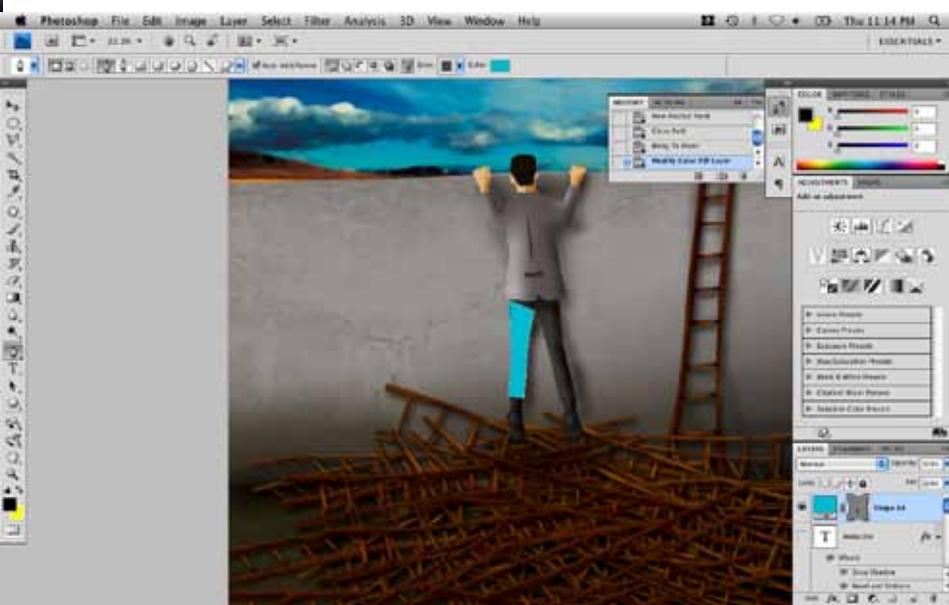
Apa yang kita bayangkan saat mendengar kosa kata "Pembangunan Manusia"? Bisa jadi yang pertama melintas di benak kita adalah gambaran bangunan ataupun figur manusia. Namun ide yang pertama kali melintas biasanya bukan hal yang spektakuler, karena biasanya hanya ide spontan yang tidak dilandasi sebuah makna. Penggalan ide dasar dibutuhkan usaha berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah konsep dengan pemaknaan yang kuat. Ide setiap orang pastilah berbeda-beda, tinggal bagaimana seorang

desainer melekatkan sebuah konsep pada suatu objek visual. Walaupun hasil akhir adalah tujuannya tapi proses mewujudkan ide menjadi sebuah "artwork" adalah tantangan tersendiri bagi seorang desainer. Pada prinsipnya pembuatan cover ini melalui beberapa tahapan: *Sketching/manual drawing, Scanning, Digital Coloring* dan *Finishing*.



Dok. draCili

PROSES Sketsa, pengolahan gambar secara digital, pewarnaan hingga sentuhan akhir selalu mewarnai setiap pembuatan cover Majalah Simpul Perencana



Sketching, pada Simpul kali ini kami mencoba menggali ide dengan tema “Pembangunan Manusia” dengan menyajikan simbol-simbol terkait tema tersebut. Dimulai dari sketsa pada “*sketch book*” dengan teknik *manual drawing*. Dari beberapa percobaan corat-coret sketsa maka kami memvisualisasikan 4 objek: tangga, manusia, tembok dan latar sebagai *ambience*. Ide menggunakan tangga sebagai simbol yang mewakili resource (sumber daya), Tembok merupakan representasi dari masalah dan manusia sebagai pelaku. Secara keseluruhan yang ingin disampaikan adalah bahwa manusia seringkali memiliki sumberdaya yang berlimpah hanya saja tidak tahu cara menggunakannya. Tangga yang seharusnya hanya butuh satu saja untuk melihat apa yang ada di balik tembok hanya di tumpuk sebagai pijakan. Hasil sketsa inilah yang dijadikan sebagai acuan.

Scanning, Hasil sketsa yang sudah jadi diubah menjadi *file* digital dengan bantuan scanner. Semakin besar resolusinya tentunya semakin baik. Pada kasus ini kami menggunakan resolusi 600 dpi. Setelah didapatkan *file* digital dalam format .JPG, maka bisa diolah pada tahap selanjutnya dengan menaikkan level, kontras maupun *curve* dengan *software* pengolahan gambar seperti Photoshop.

Digital coloring, menggunakan photoshop. Ini adalah tahapan yang paling menentukan dari sisi teknik. Pewarnaan dimulai dengan membuat path pada *file* digital hasil *scanning*. Setidaknya dibutuhkan lebih dari 100 layer. Pewarnaan dilakukan dengan teknik *blending* dengan memanipulasi *highlight* maupun *backlight*.

Logikanya adalah menggambar ulang secara digital dengan sketsa manual sebagai acuannya.

Finishing, dengan menambahkan efek bayangan, ornamen, *texturing*, mengkoreksi warna, *merging layers* dan menambahkan teks sebagai penguat pesan yang ingin disampaikan. Setelah semuanya dirasa cukup maka proses selanjutnya adalah menyimpan *file* dengan format yang diperlukan untuk keperluan tata letak. Semua proses di atas cukup mudah, hanya butuh ketelitian dan ketelatenan. (SIMPUL)

KREATIVITAS TANPA BATAS

Sebuah perusahaan di Amerika menyeleksi calon karyawannya dengan cara yang unik, yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang membutuhkan kreativitas dalam menjawabnya. Bila jawabannya dianggap benar, ia akan langsung diterima di perusahaan tersebut.

Situasinya adalah seperti ini: Anda sedang mengendarai mobil yang hanya cukup untuk dua orang penumpang saja di tengah badai yang hebat. Mobil Anda lalu melewati halte tua dan di sana Anda melihat tiga orang tengah menunggu pertolongan. Orang pertama adalah seorang nenek yang nampak sudah sekarat karena kedinginan, orang kedua adalah seorang pria yang pernah menyelamatkan hidup Anda, dan yang ketiga adalah pujaan hati yang sudah lama Anda incar.

Pertanyaannya adalah karena mobil Anda hanya muat untuk satu orang saja – karena yang satu sudah Anda duduki, manakah dari ketiga orang itu yang akan Anda tolong? Silahkan anda pilih salah satunya dalam hati. Nah, sebelum Anda tahu jawaban mana yang paling benar, Anda tentunya sudah meraba bahwa kreatifitas dalam berpikir sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tadi.

Saat ini orang-orang kreatif sangat dibutuhkan di banyak

perusahaan, tidak hanya sebatas di bidang periklanan atau industri film. Karena orang-orang yang pandai berkreasi dalam setiap situasi, adalah orang yang luwes dan termasuk dalam katagori orang yang memiliki Kecerdasan Emosi. Bukankah mereka yang berhasil dalam karir dan bisnis kebanyakan adalah yang memiliki kecerdasan emosi?

Kreativitas tidak berhubungan langsung dengan bakat. Kreativitas ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang tersimpan di “perpustakaan” memori Anda. Semakin sering dan banyak Anda membaca buku, semakin banyak pulalah inspirasi kreativitas tersimpan di hard disc otak Anda yang hingga saat ini kapasitasnya belum ada yang mampu menandingi, bahkan oleh komputer tercanggih sekali pun yang pernah diciptakan di muka bumi ini.

Para ahli menemukan bahwa kemampuan otak manusia baru dipakai sekitar 5% saja. Manusia yang diyakini telah menggunakan kapasitas otaknya sebesar 7% adalah Albert Einstein. Anda bisa

mencoba untuk memaksimalkan kerja otak Anda dengan mencoba menjawab pertanyaan tadi.

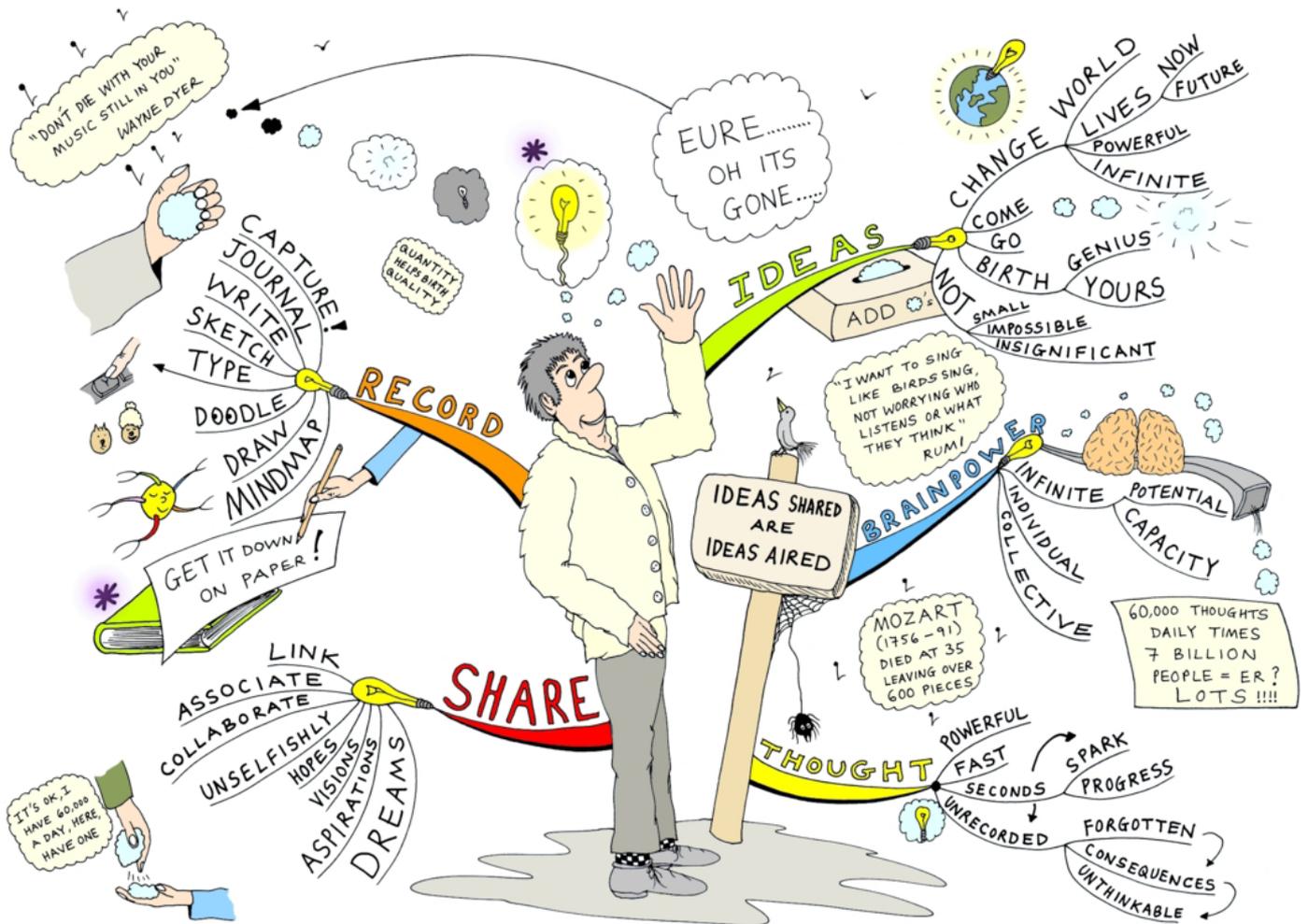
Kita seringkali mudah melupakan isi buku yang pernah dibaca, namun bukan berarti itu sia-sia. Yang terpenting bukanlah rinciannya melainkan inti sari atau pesan moral yang akan mempengaruhi pola pikir pembacanya. Anda mungkin sudah lupa siapa nama bapak guru gank Laskar Pelangi dalam novel "Laskar Pelangi" yang luar biasa itu, tapi Anda tentu terinspirasi oleh novel atau film itu.

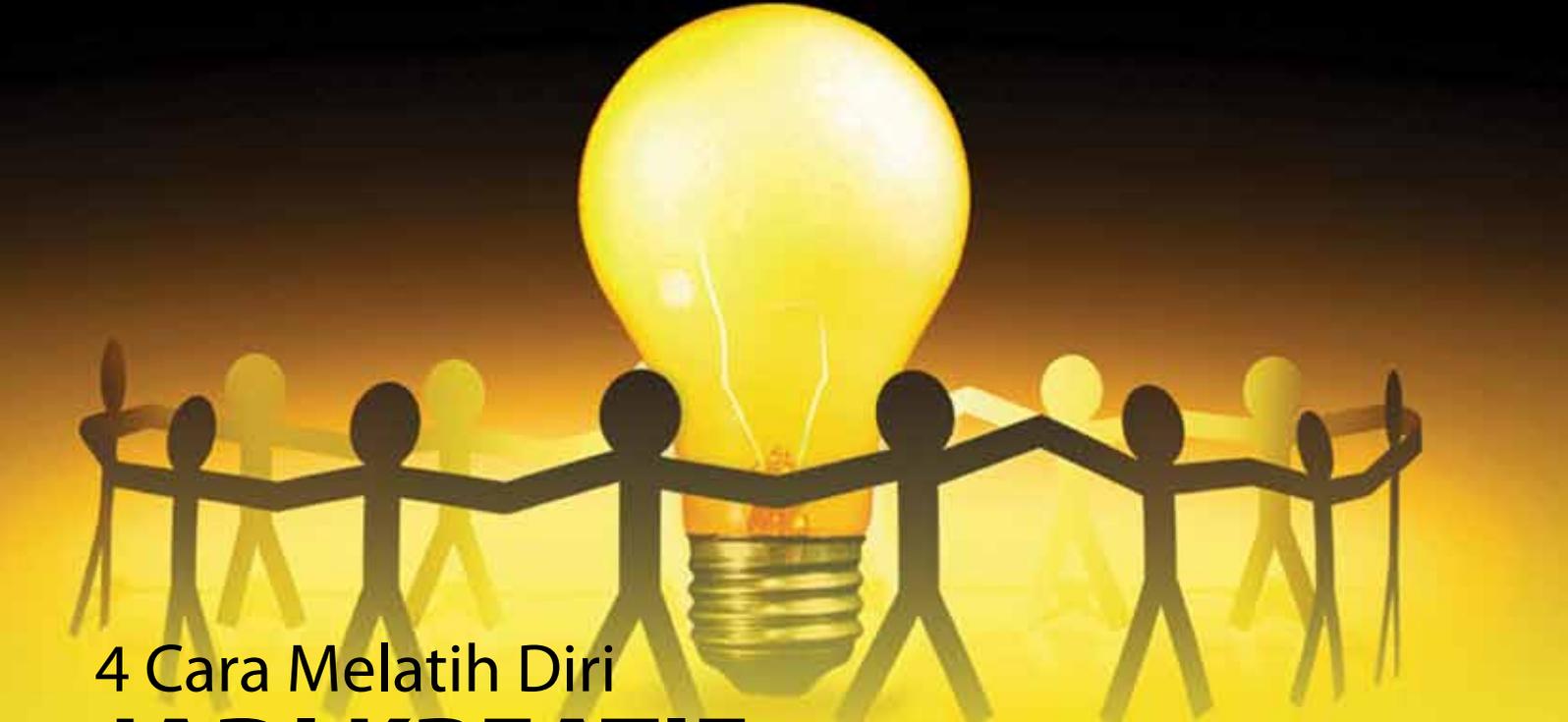
Jawaban kreatif yang dianggap benar oleh perusahaan tersebut rupanya adalah: Anda turun dari mobil lalu menemui orang yang pernah menyelamatkan hidup Anda, minta tolong untuk menyelamatkan nenek tua yang kedinginan itu. Sementara itu Anda menikmati saat-saat romantis berdua bersama dengan sang pujaan hati.

Kalau Anda tadi memilih menolong nenek yang sekarat, tidak usah kecewa, meskipun Anda tidak diterima bekerja, setidaknya Anda sudah menolong hidup seseorang.

(Sigit Risat)

Sumber: http://id.jobsdb.com/id/EN/Resources/JobSeekerArticle/kreativitas_tanpa_batas?ID=1242





4 Cara Melatih Diri JADI KREATIF

Dalam dunia kerja, kreativitas diartikan sebagai kemampuan mencari solusi atau menciptakan ide-ide inovatif dalam menangani pekerjaan. Dalam proses itu, Anda juga bisa mencoba cara atau sudut pandang yang unik atau berbeda dalam memecahkan masalah. Dengan begitu akan didapatkan solusi yang lebih baik, bahkan sangat baik.

Sifat kreatif dapat muncul jika kita ulet mengasahnya. Sebagian orang sering sekali merasa tidak kreatif. Banyak karyawan, terutama yang berusia di atas 30 tahun, merasa terlambat untuk menjadi kreatif. Namun konsultan karier Andin Andiyasari, MSi, percaya bahwa semua orang bisa kreatif.

“Kreativitas tidak dibatasi usia. Ada orang yang mendapatkan ide dan mengimplementasikannya pada saat ia telah berusia 66 tahun. Salah satu contohnya adalah pendiri restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken, Colonel Harland Sanders,” jelas Managing Partner CHR Psychometrics Consulting dan Career Coach di Konsultankarir.com ini.

Karyawan kreatif biasanya memiliki sifat tekun, pekerja keras, mandiri (baik dalam berpikir dan bertindak), bisa membuat keputusan sendiri, dan tidak menunggu orang lain mengatakan apa yang harus dilakukannya.

Ia juga tidak terpaku pada prosedur atau sistem yang telah baku dan memiliki dorongan untuk berpikir atau berkarya secara orisinal. Ia hanya puas jika solusi yang didapatkannya murni hasil pemikirannya dan memenuhi standar yang ditetapkannya. Ia pun puas jika bisa memberikan ide, pendapat, atau sesuatu yang baru.

Latih dari sekarang. Menurut Andin, tidak ada kata terlambat untuk menjadi kreatif. “Memberanikan diri untuk bertindak dan yakin dengan apa yang Anda ingin lakukan, dapat memunculkan sisi kreatif Anda,” jelas Andin. Di bawah ini adalah cara-cara sederhana untuk mengasah kreativitas. Anda bisa mencoba dan memulainya sekarang juga. Semakin sering Anda berlatih, semakin terasah kreativitas Anda.

Observasi. Amati hal-hal yang ada di sekitar Anda dan aplikasikan apa yang Anda pelajari dari situasi itu pada situasi yang Anda hadapi saat ini. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara membaca koran, buku, atau majalah, menonton televisi, mendengarkan radio, dan lain-lain. Atau bisa pula belajar dari pengalaman orang di sekitar Anda. Buka mata dan telinga, dan jangan malas mencari informasi baru. Bila terbiasa mempelajari situasi lingkungan sekitar, Anda akan terlatih bila suatu saat menemui hal yang sama.

Modifikasi. Anda bisa memulainya dengan memodifikasi atau mengubah kebiasaan Anda sehari-hari. Misalnya: mengganti rute perjalanan ke kantor. Dengan mencoba jalan lain, mungkin Anda akan menemukan rute yang lebih efisien dan efektif. Atau mengubah kebiasaan memakai jam tangan (semula di lengan kanan berubah ke lengan kiri). Perubahan kecil ini dapat merangsang otak Anda untuk memikirkan cara yang lebih unik.

Eliminasi. Berani melakukan pengurangan fungsi bila ternyata hal tersebut justru menurunkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Adaptasi. Menjadi kreatif tidak harus muncul dengan ide-ide orisinal secara murni. Orang yang kreatif seringkali mengadaptasi apa yang telah diterapkan di tempat lain. Contoh Howard Schultz, pendiri warung kopi Starbucks. Ia mengadaptasi kebiasaan orang Italia minum kopi untuk diterapkan di Amerika. Usaha kreatifnya itu ternyata sukses besar. Tidak ada salahnya bila Anda terinspirasi oleh ide orang lain dan mengembangkannya. Tapi hati-hati, jangan terjebak dalam tindakan menjiplak atau plagiat.

(Emy Agustia)

Sumber: <http://female.kompas.com/read/2011/08/03/10274996/4.Cara.Melatih.Diri.Jadi.Kreatif>



Pusbindiklatren Bappenas dalam Sosialisasi Program Diklat Gelar, Non Gelar dan JFP

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id



S

Pusbindiklatren Bappenas BEASISWA SPIRIT

Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution

Reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat, sangat diperlukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian manajemen dan *critical mass* dalam rentang serta tataran yang meliputi kebijakan, regulasi, tata kelola, penilaian, pembinaan, serta dukungan sumber daya yang kondusif.

KRITERIA SELEKSI ADMINISTRASI (PIU Bappenas)

- ✓ Diusulkan oleh minimal pejabat eselon II
- ✓ Pendidikan akhir minimal S-1/D4 untuk program S-2 & pendidikan akhir minimal S-2 untuk program S-3 dengan tahun kelulusan minimal 2 tahun
- ✓ Masa kerja minimal 2 tahun (sebagai PNS 100%)
- ✓ **IPK minimal:**
 - Dalam Negeri S-2: 2,75 | S-3: 3,25
 - Linkage S-2: 2,75
 - Luar Negeri S-2: 2,75 | S-3: 3,50
- ✓ **Usia maksimal:**
 - 41 Tahun untuk S-2 Dalam Negeri, Linkage dan Luar Negeri
 - 41 Tahun untuk S-3 Dalam Negeri, dan Luar Negeri
 - 55 Tahun untuk program Non Gelar dan Magang

KRITERIA SELEKSI AKADEMIK

- ✓ **Tes Potensi Akademik (TPA): 565**
- ✓ **ITP TOEFL:** S-2: 450 | S-3: 500
Non Gelar dan Magang: 450
- ✓ **Lulus Wawancara**

Proses Pendaftaran dilakukan melalui website resmi Spirit yaitu TRANSPAR pada alamat akses:

spirit.bappenas.go.id

Seluruh tahapan SPIRIT akan diumumkan dalam website TRANSPAR

INFORMASI:

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Surapati No. 2 Jakarta 10310, Gedung 2A Lantai II
T:(021) 31931447, 31934147
F:(021) 3103705
E-Mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
spirit.bappenas.go.id